



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH



Pengadilan Militer I-04 Palembang

LKJIP

Kata Pengantar



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2024 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan Tupoksi yang diembannya kepada publik, yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang atas pencapaian *output/ sub output* penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Beberapa program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam rangka mewujudkan *good governance*. Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh staf pegawai Pengadilan Militer I-04 Palembang yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer I-04 Palembang serta semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan ini, semoga Allah SWT melimpahkan hidayahnya kepada kita semua. Amin

Palembang, 14 Februari 2025
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang,


Kolonel Cbk Fredy Ferdian Isnartanto

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2024 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024. Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2024 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan tanggung jawab terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2020–2024.

Visi Pengadilan Militer I-04 Palembang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG YANG AGUNG”.

Misi Pengadilan Militer I-04 Palembang :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-04 Palembang.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer I-04 Palembang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Motto Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah : **“Bersamo Kito Pacak”.**

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah :

- Pertama** : Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi; dan
Kedua : Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan.

Dari tujuan tersebut maka sasaran Pertama yaitu Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; Kedua adalah Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; dan Ketiga adalah Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan. Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 6 indikator kinerja dan 6 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa tiga sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/ Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tercapai dengan capaian kinerja sebesar **101,02%**. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN		
No	Sasaran Strategis	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	104,4%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	100%
Jumlah Persentase Capaian Kinerja		101,02%

Secara keseluruhan target kinerja tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditentukan baik dari Sasaran Strategis I , II , dan III. Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis I pada Tahun 2024 yaitu Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dengan indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi, dan indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan. Dari hasil perhitungan maka capaian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 adalah Sebesar 104,4%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis I pada tahun 2024 dapat dilihat dan dirincikan dalam tabel sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS I				
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	100%	100%	100%
b.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	75%	85,7%	114,2%
c.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	96%	95,7%	99,7%
d.	Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan	92%	96%	104,3%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I				104,4%

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II pada Tahun 2024 yaitu Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu. Dari indikator kinerja ini Dilmil I-04 Palembang telah memiliki capaian sebesar 100%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis II pada tahun 2024 dapat dilihat dan dirincikan dalam tabel sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS II				
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu.	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II				100%

Dan tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis III pada Tahun 2024 yaitu Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dengan indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. Dari indikator tersebut capaian yang dimiliki oleh Dilmil I-04 Palembang adalah sebesar 100%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis III pada tahun 2024 dapat dilihat dan dirincikan dalam tabel sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS III				
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III				100%

Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Dilmil I-04 Palembang telah mencapai capaian kinerja pada Sasaran Strategis. Hal ini dapat terjadi karena telah semakin meningkatnya kinerja yang telah terjadi selama kurun waktu 1 tahun. Akan tetapi tidak dipungkiri juga masih ada beberapa capaian yang belum dapat dimaksimalkan karena ada kendala-kendala yang ditemukan selama melaksanakan kinerja tersebut. Kedepannya diharapkan laporan kinerja ini pula dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk capaian kinerja di tahun-tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksklusif	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	13
D. Isu Strategis.....	17
E. Sistematika Penyajian.....	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	20
A. Rencana Strategis 2020-2024	20
B. Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024	33
C. Penetapan Kinerja Tahun 2024	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	35
A. Capaian Kinerja Organisasi	35
B. Realisasi Anggaran.....	76
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	81

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Peta Wilayah Hukum
3. Capaian Kinerja Tahunan Tahun 2024
4. Daftar Pegawai yang Mengikuti Diklat tahun 2024
5. Reviu Indikator Kinerja Utama
6. Reviu Matrik Rencana Strategis 2020-2024
7. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan 2025
8. SK Tim Penyusunan LKJIP 2024
9. Realisasi Anggaran DIPA (01) BUA MARI Tahun 2024
10. Realisasi Anggaran DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MARI Tahun 2024
11. Undangan, Notulen Rapat, Dokumentasi dan Daftar Hadir Rapat Penyusunan LKJIP Tahun 2024
12. Pernyataan telah di Reviu, Checklist Kelengkapan, dan Notulen Rapat Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Pengadilan Militer I-04 Palembang dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apalagi Pengadilan Militer I-04 Palembang juga menggunakan dana APBN, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Militer I-04 Palembang mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

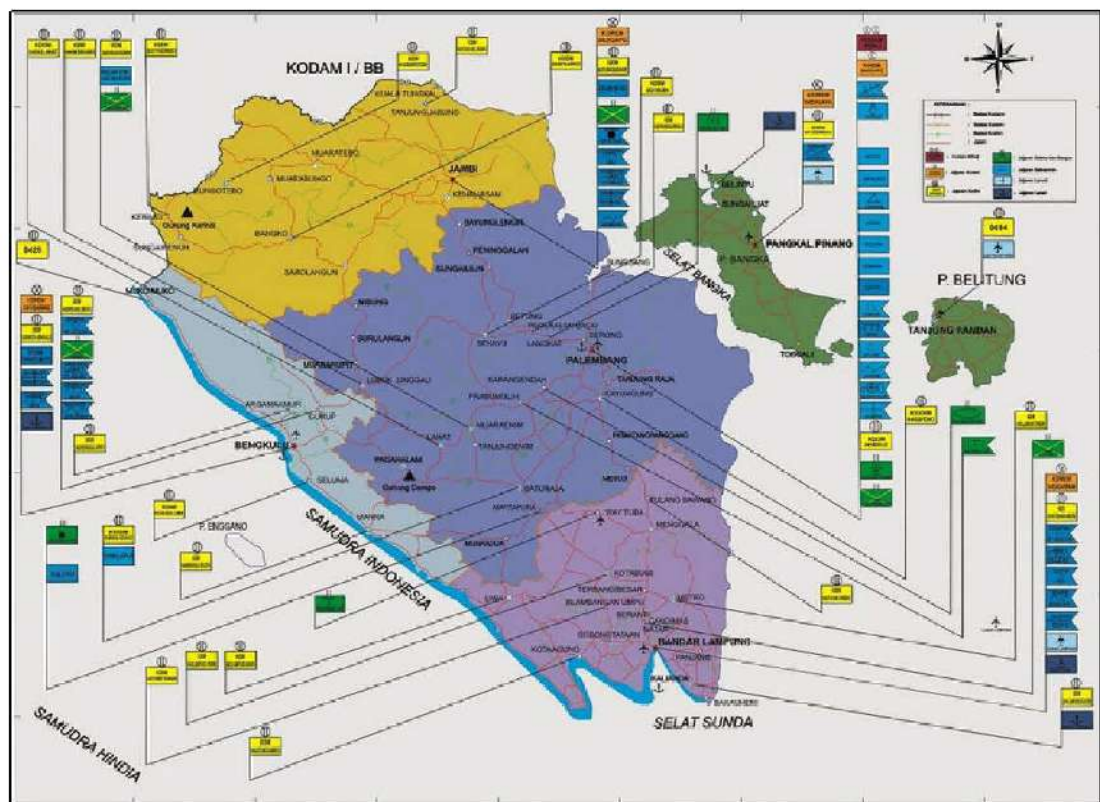
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,, Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai Lembaga Peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut :



1. KEDUDUKAN

Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Militer I-04 Palembang semenjak tanggal 9 Juli 2004 secara Organisasi, Administrasi dan Finansial berkedudukan/ berada dibawah Mahkamah Agung RI, sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung.



Wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Militer I-04 Palembang meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung.

2. **FAKTOR PENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. **Sarana dan prasarana.**

Gedung yang ditempati oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang beralamat di Jl. H. Bastari, Komplek Perumahan Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Palembang, dan untuk mencapai ke gedung ini cukup mudah serta dapat ditempuh dari beberapa arah karena lokasinya terletak di dalam kota Palembang.

Berikut data fisik lahan dan bangunan Pengadilan Militer I-04 Palembang :

a. Status lahan : Sertifikat Hak Pakai No. 36 atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Pengadilan Militer Palembang, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Palembang tanggal 12 April 2013.

b. Luas tanah : 3.250 M² (tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi).

c. Luas bangunan : 1021 M² (seribu meter persegi) terdiri dari 2 (dua) lantai :

d. Batas-batas :

- 1). Utara (depan) : Jl. Utama Perumahan OPI.
- 2). Timur (kanan) : Gedung BNN Palembang.
- 3). Barat (kiri) : Gedung Bawaslu Palembang.
- 4). Selatan (belakang) : Tanah kosong milik Pemprov Sumsel.

Sarana dan Prasarana Pada Pengadilan Militer I-04 Palembang

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Ket
Lantai 1 (satu)			
1.	Ruang Sidang Utama	1	
2.	Meja PTSP	1	
3.	Ruang Sekretaris	1	
4.	Ruang Umum & Keuangan	1	
5.	Ruang Kepegawaian & Ortala	1	
6.	Ruang Perencanaan, IT, Pelaporan	1	
7.	Ruang Panel	1	
8.	Ruang Tunggu	1	
9.	Ruang Tahanan Pria	1	
10.	Ruang Tahanan Wanita	1	
11.	Toilet Pria	1	
12.	Toilet Wanita	1	
13.	Ruang Oditur	1	
14.	Ruang Penasihat Hukum	1	
15.	Ruang Perpustakaan	1	
16.	Ruang Klinik dan Laktasi	1	

Lantai 2 (dua)			
1.	Ruang Kepala	1	
2.	Ruang Waka	1	
3.	Ruang Ajudan	1	
4.	Ruang Pokkimmil	1	
5.	Ruang Sidang	1	
6.	Ruang Rapat	1	
7.	Ruang Kepaniteraan	1	
8.	Toilet Pria	1	
9.	Toilet Wanita	1	
10.	Ruang Arsip Perkara	1	
11.	Ruang IT/Server	1	
Sarana/Prasarana Fasilitas Kantor			
1.	Mesin ketik manual standard (14-16) inci	1	Baik
2.	Mesin ketik listrik standard (14-16) inci	1	Baik
3.	Mesin fotocopy folio	2	Baik
4.	Lemari Kayu	11	Baik
5.	Lemari Besi/Metal	13	Baik
6.	Mesin Diesel	1	Baik
7.	Movitex Board	1	Baik
8.	Meja Rapat	2	Baik
9.	Filing cabinet besi	8	Baik
10.	Brandkas	1	Baik
11.	Buffet	3	Baik
12.	Mobile File	2	Baik
13.	Alat penghancur kertas	3	Baik
14.	Mesin absensi	1	Baik
15.	Projector/infocus	1	Baik
16.	Papan Pengumuman	1	Baik
17.	Meja kerja kayu	61	Baik
18.	Kursi besi/metal	202	Baik
19.	Kursi kayu	13	Baik

20.	Meja Resepsionis	1	Baik
21.	Sofa Bed	2	Baik
22.	Partisi	2	Baik
23.	Publik Astari (pembatas Antrian)	4	Baik
24.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik
25.	Mesin Pemotong Rumput	1	Baik
26.	Lemari Es	1	Baik
27.	A.c. Split	35	Baik
28.	Kitchen Set	1	Baik
29.	Televisi	5	Baik
30.	Sound System	1	Baik
31.	Unit Power Supplay	11	Baik
32.	Stabilisator	2	Baik
33.	Tiang Bendera	4	Baik
34.	Dispenser	4	Baik
35.	Lambang Instansi	1	Baik
36.	Hendy Cam	1	Baik
37.	Camera Digital	1	Baik
38.	Faxsimile	1	Baik
39.	P.C. Unit	27	Baik
40.	Note Book	22	Baik
41.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	Baik
42.	Scanner	3	Baik
43.	Server	2	Baik
44.	Router	1	Baik
45.	Cat 6 Cable	1	Rusak
46.	Peralatan Jaringan Lainnya	1	Rusak
47.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1	Baik
48.	Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	1	Baik

49.	Lisensi	1	Baik
50.	Tanah Bangunan Kantor	1	Baik
51.	Tanah Kosong	1	Baik
52.	CCTV	1	Baik
53.	Rak Server	2	Baik
54.	Gordyin/Kray	114	Baik
55.	Alat Pemotong Kertas	1	Baik
56.	Mesin Pelubang Kertas	1	Baik
57.	Tabung Pemadam Api	4	Baik
58.	Kursi Roda/Kursi Dorong	1	Baik
59.	Lemari Arsip	2	Baik
60.	ATR	1	Baik
61.	Meja Rapat	2	Baik
62.	Kasur/Spring Bed	2	Baik
63.	Laptop	4	Baik
64.	LCD Monitor	1	Baik
65.	Loudspeaker	4	Baik
66.	Microphone	7	Baik
67.	Audio Mixing Console	1	Baik
68.	Camera Conference	1	Baik
69.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	4	Baik
70.	Bracket Standing Peralatan	1	Baik
71.	Printer	13	Baik
72.	Kursi	50	Baik
73.	AC. Spilt	4	Baik
74.	AC Standing	4	Baik
75.	Kursi Tamu	1	Baik
76.	Voice Recorder	1	Baik
77.	Monografi	2	Baik

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
A.	Jenis Kendaraan Roda 4					Kondisi
1.	<i>Toyota Kijang Innova E</i>	2008	Baik			50 %
2.	<i>Nissan Grand Livina</i>	2011	Baik			60 %
3	<i>Toyota Vios</i>	2024	Baik			100%
B.	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	<i>Honda Supra X 125 R</i>	2006	Baik			60 %
2.	<i>Honda Mega Pro CW</i>	2007	Baik			60 %
3.	<i>Honda Mega Pro STD</i>	2008	Baik			60 %
4.	<i>Honda Revo NF 100 TD</i>	2008	Baik			60 %
5.	<i>Honda Revo NF 100 TD</i>	2008	Baik			60 %
6.	<i>Honda Revo NF 100 TD</i>	2008	Baik			60 %
7.	<i>Honda Revo NF 100 TD</i>	2008	Baik			60 %
8.	<i>Honda GL MAX</i>	2005		Rusak Ringan		45 %
9.	<i>Honda Tiger CW GL 200 R</i>	2009	Baik			75 %
10.	<i>Honda Mega Pro STD</i>	2009	Baik			65 %

Sumber : Laporan Bulanan Program kerja Des 2024

2. Tenaga Personil Pengadilan Militer I-04 Palembang

Personil Pengadilan Militer I-04 Palembang terdiri dari Personil TNI dan Aparatur Sipil Negara (ASN), Personil TNI sebanyak 19 (sembilan belas) Orang, Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 14 (tiga belas) Orang dan PPNPN untuk Satpam, Pengemudi dan Pramubakti sebanyak 11 (sebelas) orang, jumlah seluruhnya adalah 43 (empat puluh tiga) orang.

No	Nama	Pkt/Gol	Jab	Dik	Ket
I. Personel Militer Pengadilan Militer I-04 Palembang					
1.	Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.	Kolonel Chk	Kepala	S2	-
2.	Syawaluddinsyah, S.H., M.H.	Letkol Chk	Wakil Kepala	S2	-
3.	J.M.Siahaan, SH.,M.Hum.	Letkol Chk	Hakim	S2	BP ke Dilmil II-08 Jakarta
4.	Endah Wulandari, S.H., M.H.	Mayor Chk (K)	Hakim	S3	-
5.	Arif Dwi Prasetyo, S.H.,M.H.	Mayor Chk	Hakim	S1	-
6.	Dr. Putra Nova A.S., S.H.,M.H.	Mayor Chk	Hakim	S3	-
7.	Sugiarto, S.H.	Kapten Chk	Hakim	S1	-
8.	Afini Perdana, S.ST.Han., S.T., S.H.,M.H.	Kapten Chk	Hakim	S2	-
9.	Zulkopli, SH.,MH.	Mayor Chk	Panitera	S2	-
10.	Supriyadi, S.H., M.H.,MKn.	Mayor Chk	Sekretaris	S2	-
11.	Gunadi, S.H.	Lettu Chk	Panitera Muda Pidana	S1	-
12.	Zulkarnain, S.H.	Lettu Chk	Panitera Muda Hukum	S1	-
13.	Sapriyanto, S.H.	Peltu	Panitera Pengganti	S1	-
14.	Hari Wibowo, S.H.	Serma	Klerek -Pengelola Penanganan Perkara Pada Panmud Hukum	S1	-
15.	Rosita, S.H.	Serma (K)	Klerek -Pengelola Penanganan Perkara Pada Panmud Hukum	S1	-
16.	Sarjito	Serma	Klerek -Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Umum dan Keuangan	SMA	-

17.	Elsy Apriyani	Sertu APM/W	Klerek – Pengadministrasi Perkantoran pada Panmud Pidana	SMA	-
18.	Daroni	Kopka	Klerek - Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Keuangan	SMP	-
II. Aparatur Sipil Negara (ASN) Pengadilan Militer I-04 Palembang					
1.	Agustina Yanti, S.H.	Penata Tk.I	Kasubbag Umum dan Keuangan	S1	-
2.	Muhammad Nasir, S.H.	Penata Tk.I	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	S1	-
3.	Febriansyah, S.H.	Penata	Kasubbag PerencanaanTI & Pelaporan	S1	-
4.	Devi Wahyuni, S.H.M.H.	Penata	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	S2	-
5.	Sorna Nauli Nasution, S.H.	Penata Muda TK-I	Pranata Keuangan APBN Mahir	S1	-
6.	Mona Anggreyni, S.I.P., MAP	Penata Muda TK-I	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S2	-
7.	Yusyanto, S.H	Penata	Operator – Penata Layanan Operasional Sub Bagian Umum dan Keuangan	S1	-
8.	M. Maniar Marpaung	Penata Muda Tk-I	Klerek - Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Keuangan	SMA	-
9.	Sulistyo	Penata Muda Tk-I	Klerek - Pengadministrasi Perkantoran Pada Panitera Muda Pidana	SMA	-

10.	Alexander S. Sihotang, SE	Penata Muda Tk. I	Klerek -Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, dan Pelaporan	S1	-
11.	Srilanjari, A.Md	Pengatur Tk. I	Klerek -Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Umum dan Keuangan	D3	-
12.	Niko Wijaya, A.Md	Pengatur	Klerek -Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi	D3	-
13.	Berliana Cahyani, A.Md.A.B	Pengatur	Klerek -Pengelola Penanganan perkara Pada Panmud Pidana	D3	Diperbantukan di Kepegawaian BP Nomor : 30/KPM.W1-Mil 04/KP 4. 1.3/N/2024 tanggal 3 Mei 2024 tentang Pelaksanaan Pergantian Mutasi Internal
III. PPNPN Pengadilan Militer I-04 Palembang					
1.	Joko Susanto	-	PPNPN Satpam	SMA	Diperbantukan di Staf Kepegawaian & Ortala
2.	Febriadi	-	PPNPN Pramubakti	SMA	Diperbantukan di Staf Perkara
3.	Joni Per, SH	-	PPNPN Pengemudi	S1	Diperbantukan di Staf Umum & Keuangan
4.	Angga Wijaya,SH	-	PPNPN Pramubakti	S1	Diperbantukan di Staf P.T.I.P
5.	Sugeng Riadi, SE	-	PPNPN Satpam	S1	Diperbantukan di Staf P.T.I.P

6.	Zainul Arifin, S.Kom	-	PPNPN Satpam	S1	-
7.	Desly Farghani, S.H	-	PPNPN Pramubakti	S1	Diperbantukan di Staf P.T.I.P
8.	Andri Febriansyah, S.Pd	-	PPNPN Satpam	S1	-
9.	Muhammad Robi	-	PPNPN Satpam	SMA	-
10.	Eno Violita, SH	-	PPNPN Pramubakti	S1	Diperbantukan di Staf Umum & Keuangan
11.	Putra Bagus Hartawan	-	PPNPN Satpam	SMA	-

Sumber : Laporan Bulanan Program kerja Des 2024

3. TUGAS POKOK

Mengenai justisiabel Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) berpangkat Kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana (kejahatan) maupun pelanggaran masih berdinasi aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer. Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang. Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja disuatu lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Militer I-04 Palembang yang tugas pokoknya menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. FUNGSI

Pengadilan Militer I-04 Palembang, di bidang fungsi teknis yudisial bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010-2035. Fungsi teknis tersebut antara lain :

- a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*) yakni:
Memeriksa dan memutus dalam Peradilan Tingkat Pertama atas perkara-perkara tindak pidana dan pelanggaran yang Terdakwanya adalah prajurit TNI berpangkat Prada sampai dengan Kapten (berdasarkan Perundang-undangan menjadi wewenangnya). Mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi, Grasi dan Peninjauan Kembali dalam perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.
- b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan kepada Jajarannya tentang teknis yudisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang atas pelaksanaan tugas peradilan, perilaku Hakim, perilaku Panitera dan Pegawai, pelaksanaan administrasi perkara, pelaksanaan dan administrasi umum.
- d. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- e. Fungsi lainnya sesuai kewenangan dan undang-undang.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Militer di dasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

1. Susunan Organisasi

Organisasi Pengadilan Militer I-04 Palembang disusun sebagai berikut :

a. Unsur Pimpinan

1) Kepala Pengadilan Militer

Sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Pengadilan Militer Tinggi dan Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Mahkamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, tegoran atau peringatan

bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara pertama yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Makamah Agung dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank.

b. **Wakil Kepala Pengadilan Militer.**

Melaksanakan tugas kepala apabila kepala berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh kepala kepadanya.

c. **Unsur Kepaniteraan.**

Panitera

membawahi antara lain :

1) **Panitera Muda Pidana.**

Bertugas membantu Panitera dalam melaksanakan administrasi perkara dibidang pidana. Secara rinci tugas dan fungsi Panitera Muda Pidana Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana/ kejahatan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara Lalu lintas
- c. Pelaksanaan registrasi perkara;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan
- f. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- g. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

- h. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

2) **Panitera Muda Hukum.**

bertugas membantu Panitera dalam melaksanakan administrasi perkara dibidang Pidana Hukum. Secara rinci tugas dan fungsi Panitera Muda Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat, dan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Serta membawahi kelompok jabatan Fungsional :

3) **Panitera Pengganti**

Tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai diminutasi.

d. **Unsur Kesekretariatan.**

Sekretaris

membawahi antara lain :

1) **Kasub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.**

Bertugas membantu Bagian Perencanaan dan dalam melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta

penyusunan laporan.

2) **Kasub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.**

Bertugas untuk melaksanakan urusan Kepegawaian dalam melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana.

3) **Kasub Bagian Umum dan Keuangan.**

Bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Serta membawahi kelompok jabatan Fungsional :

- a) Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN;
- b) Fungsional Pranata Keuangan; dan
- c) Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia.

e. **Unsur Pelaksana.**

1) **Kelompok Hakim Militer, disingkat Pokkimmil**

Bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani Putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang ditugaskan kepadanya serta mengurus kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada Hakim-hakim yang bersangkutan.

2. **Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG



D. ISU STRATEGIS

Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai pengadilan tingkat pertama memiliki peran yang sangat penting, mengingat Pengadilan Militer I-04 Palembang menerima, memeriksa serta memutus perkara yang diberikan kepadanya yaitu prajurit TNI mulai dari pangkat prajurit sampai dengan kapten.

Peran strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai pengadilan tingkat pertama adalah dalam hal mengadili perkara tingkat pertama di wilayah hukumnya, serta memberikan pelayanan dan penerangan / pembinaan hukum di wilayah Sumatera Bagian Selatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer I-04 Palembang masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan

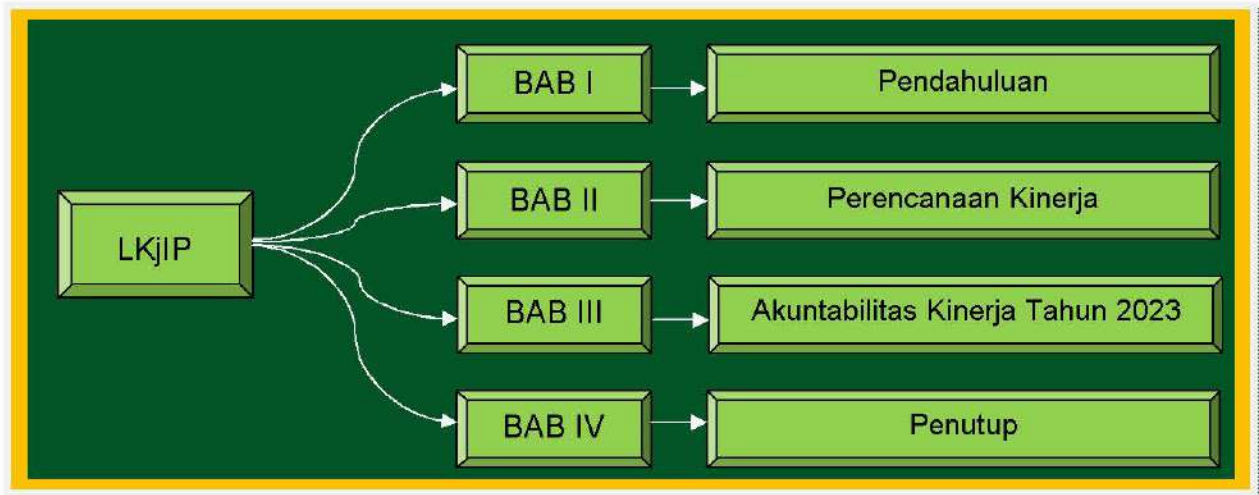
untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis dan sering menjadi sorotan masyarakat di pengadilan pada umumnya, termasuk di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah :

1. Produktifitas penyelesaian perkara. Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dituntut untuk tidak pernah berhenti meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara. Termasuk Pengadilan Militer I-04 Palembang setiap tahunnya terus dipacu untuk lebih optimal dalam menyelesaikan perkara agar tidak terjadi tunggakan perkara ataupun penyelesaian perkara yang lebih dari 5 (lima) bulan.
2. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparatur untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme dan melayani belum sepenuhnya terwujud.
3. Putusan Pengadilan dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum tidak berhenti sampai tingkat pertama tetapi memicu para pihak melakukan upaya hukum banding kasasi dan peninjauan kembali.
4. Manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, hingga eksekusi putusan, dalam prosesnya belum ada jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan.
5. Masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya etos kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan nilai-nilai universal peradilan yang *excellent* (seperti: *independency, integrity, akuntability, responsibility, transparant, impartial, dan equality*) belum sepenuhnya tertanam dan dilaksanakan oleh seluruh warga peradilan.
6. Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, yaitu keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.
7. Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan utama dan pendukung yang butuh penambahan dan pembaruan.
8. Pelaksanaan tugas pada wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang cukup luas mencakup seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung, sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan kinerja

khususnya dalam hal menghadirkan para saksi yang berada di daerah yang jauh yang dapat membebankan biaya kepada para pencari keadilan.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2024, sebagai berikut :



BAB I – Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategisc issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II – Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan ;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV – Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-04 Palembang 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-04 Palembang telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2020 – 2024 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang hukum dan aparatur. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2020 – 2024, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-04 Palembang telah dilakukan secara partisipatif antara unit satker dilingkungan hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang maupun *stakeholder eksternal*. Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. VISI, MISI DAN MOTTO

a. Visi

Visi Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah **“TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG YANG AGUNG”**.

Visi Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam melakukan aktifitasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Militer I-04 Palembang mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut :

1) Pengertian secara kelembagaan : Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota dan/atau ibu kota daerah setingkat provinsi, dan wilayah hukumnya termasuk Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung.

2) Pengertian secara organisasional : Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan wilayah hukumnya yang terdiri dari Pengadilan Militer I-04 Palembang itu sendiri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Kepala Pengadilan dan Wakil Kepala), Kelompok Hakim Militer, Panitera, Sekretaris beserta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut. Pengadilan Militer I-04 Palembang berada dibawah Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Adapun makna perkata dari visi Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut adalah :

- a) Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah Lembaga Peradilan dilingkungan badan Peradilan Militer tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota Provinsi.
- b) Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran.

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai berikut :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

c. Motto

Motto Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah : **“Bersamo Kito Pacak”**

2. TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 553/SEK/01/2014 tanggal 19 Desember 2014 dan sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam periode tahun 2020 – 2024 adalah suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan uraian secara umum sebagai berikut :

- a. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
- b. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan.
- c. Meningkatnya kepastian hukum

3. SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :
 - 1) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
 - 2) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
 - 3) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
 - 4) Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah : Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah : Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Dalam Renstra Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan 3 (tiga) langkah penting yaitu :

a. Perencanaan Strategis

Faktor-faktor kunci keberhasilan yaitu strategi dirancang melalui analisis lingkungan internal dan eksternal, dengan mempertimbangkan nilai luhur sebagai berikut :

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Berperilaku Adil
- 3) Berperilaku Jujur
- 4) Berperilaku Bijaksana
- 5) Bertanggungjawab
- 6) Menjunjung Tinggi Harga Diri
- 7) Berintegritas Tinggi
- 8) Berdisiplin Tinggi
- 9) Berperilaku Rendah Hati
- 10) Bersikap Mandiri
- 11) Bersikap Profesional

b. Penetapan Tujuan

Sesuai dengan Visi dan Misi, Pengadilan Militer I-04 Palembang harus dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan yaitu :

- 1) Terwujudnya tertib administrasi Peradilan dalam melaksanakan tupoksi.
- 2) Terwujudnya aparatur Peradilan yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi.
- 3) Terwujudnya pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dengan efektif, efisien dan berkualitas.
- 4) Terwujudnya administrasi kesekretariatan yang dapat mendukung Tupoksi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

c. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan menggunakan target selama kurun waktu tertentu. Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan beberapa program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan, antara lain :

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan program untuk mencapai sasaran strategis yang terdiri dari :

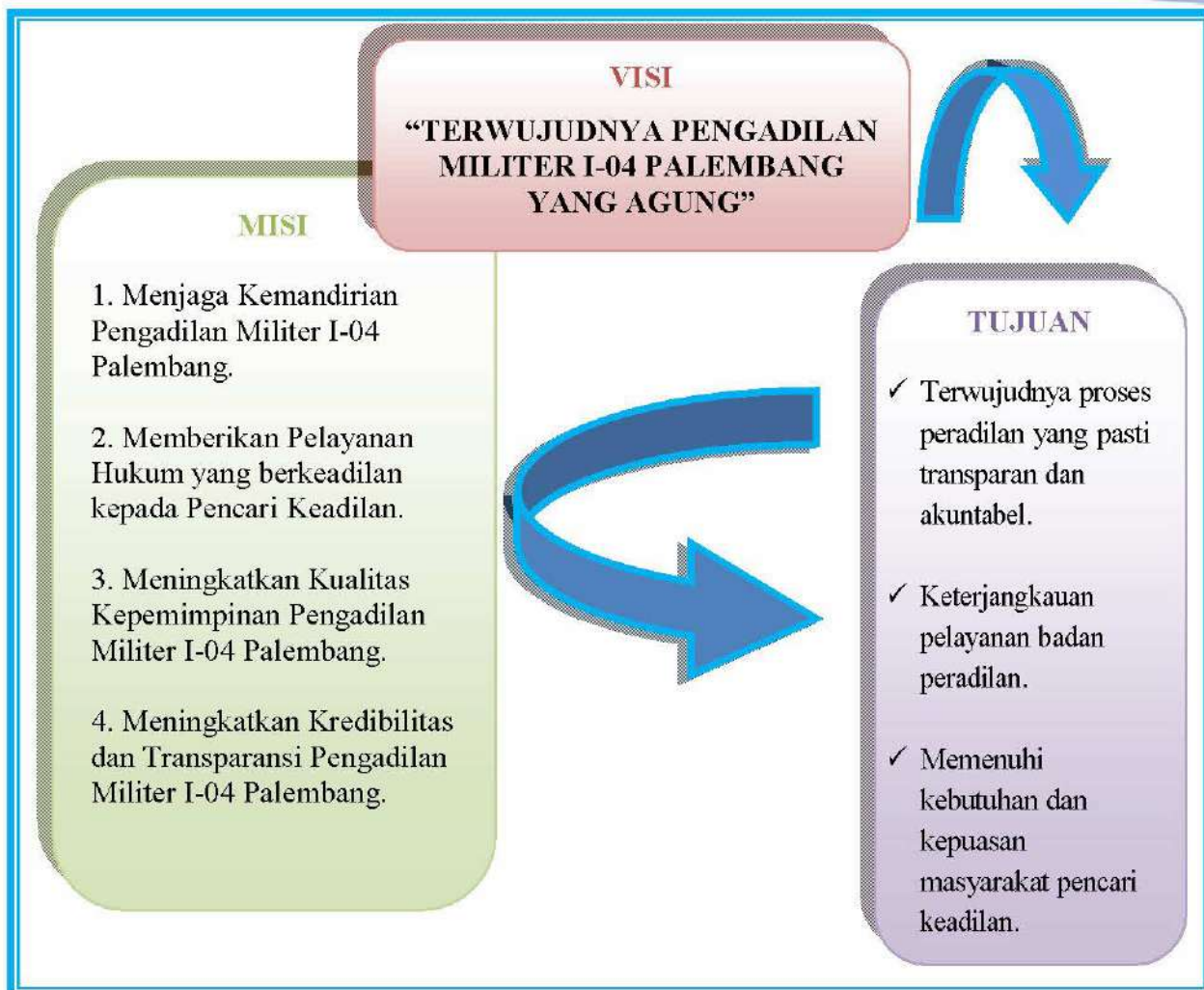
- a) Peningkatan jumlah penyelesaian perkara.
- b) Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara
- c) Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling dan Hakim Terbang untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan.
- d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya merupakan program untuk mencapai sasaran strategis, yaitu tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana, pada TA. 2024 Pengadilan Militer I-04 Palembang telah memperoleh alokasi anggaran untuk program peningkatan sarana dan prasarana, sehingga dengan demikian kegiatan pokok yang dilakukan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.



Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2020 – 2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<p>Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi</p>	<p>1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</p>	<p>1.1 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>1.2 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</p> <p>1.3 Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> <p>1.4 Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan;</p>

	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2.1 Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu.
	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	3.1 Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan



RENCANA STRATEGIS 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target					Program	Kegiatan		
				2020	2021	2022	2023	2024				
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	1.Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara Pidana/Kejahatan dan Lalu lintas yang diselesaikan tepat waktu	92%	94%	96%	98%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi		
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	89%	90%	93%	75%	75%				
			Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	89%	90%	91%	96%	96%				
			Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan	89%	90%	91%	92%	92%				
		2.Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%				
		3.Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

4. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Rencana Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Militer I-04 Palembang memuat angka target kinerja tahun 2024 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2024. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja menjadi kesepakatan bersama serta sebagai dasar bagi penetapan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja. Rencana Kinerja tahun 2024 secara singkat dapat dijelaskan dari tabel berikut ini :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	100%	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%		
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	96%		
		d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	92%		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	100%	Perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.	Panitera
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Panitera

KETERANGAN DAFTAR RENCANA KINERJA TAHUN 2024

1.a. *Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu.*

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang ada. Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasannya sebagai berikut :

- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.

- c. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- d. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- e. Perkara = Pidana/Kejahatan dan pelanggaran lalu lintas.

Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan target pada Tahun 2024 sebesar **100%** terhadap pencapaian penyelesaian perkara kejahatan dan pelanggaran putus tepat waktu. Target penyelesaian perkara juga memperhitungkan target penyelesaian perkara pidana/ kejahatan dan lalu lintas pada 5 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah perkara rata-rata yang masuk setiap tahunnya. Jumlah perkara pelanggaran lalu lintas serta realisasi pada Tahun-tahun sebelumnya sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa perkara pelanggaran (vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) dipastikan setelah sidang langsung putus karena proses penyelesaian melalui acara pemeriksaan cepat dengan hakim tunggal, sesuai dengan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

1.b. *Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding* .

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding diambil dari perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding.
- b. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan target pada Tahun 2024 sebesar **75%** dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yang tidak mengajukan upaya hukum banding mengalami kenaikan dan pada tahun 2022 Dilmil I-04 Palembang tidak mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Dari dasar tersebut Dilmil I-04 Palembang membuat keputusan untuk mengikuti target kinerja pada tahun 2024 yaitu 75% mengikuti target pada tahun 2023. Dengan penurunan target yang tidak mengajukan upaya hukum banding tersebut, diharapkan dapat terpenuhi di tahun 2024 ini.

1.c. *Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.*

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi diambil dari perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasannya sebagai berikut :

- a. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.
- b. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- c. Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan target pada Tahun 2024 sebesar **96%** dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi berdasarkan data perkara pada laporan tahunan pada tahun anggaran 2020 sampai dengan Tahun 2023.

1.d. *Index persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.*

Persentase index persepsi *Stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan diambil dari evaluasi atas komponen hasil yaitu survei kepuasan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan target index persepsi *Stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan pada Tahun 2024 sebesar **92%**, dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Dengan demikian, target index persepsi *Stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan pada Tahun 2024 diharapkan dapat terpenuhi.

2. *Persentase salinan putusan yang dikirim ke Para Pihak tepat waktu.*

Persentase salinan putusan yang dikirim ke Para Pihak tepat waktu diambil dari perbandingan antara Jumlah Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu dengan jumlah putusan. Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasannya sebagai berikut :

- a. SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan;

- b. Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah Salinan Putusan yang dikirim ke Papera, Odmil, PM dan Ankum dan sesuai dengan ketentuan;
- c. Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan;
- d. Papera : Perwira Penyerah Perkara;
- e. Odmil : Oditur Militer;
- f. PM : Polisi Militer; dan
- g. Ankum : Atasan yang berhak menghukum.

Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan target salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu pada Tahun 2024 sebesar **100%**. Demikian pula dengan berkas dilimpahkan dari Oditurat Militer I-04 Palembang segera diregister dan siap didistribusikan ke Majelis, untuk kemudian diputus dan diselesaikan (diminutasi) dengan memenuhi ketentuan acara yang berlaku. Dengan harapan, setiap perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dapat dikirim ke Oditur Militer, Terdakwa dan juga pihak yang berkepentingan tepat waktu pada Tahun 2024 mencapai **100%**.

3. *Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan*

Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan diambil dari perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan. Berdasarkan formula perbandingan diatas maka penjelasannya sebagai berikut :

- a. Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.
- b. Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar gedung Pengadilan dalam rangka percepatan perkara.
- c. Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (*rensidkan*).

Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan target perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Tahun 2024 sebesar **100%** dengan pertimbangan bahwa perkara kejahatan yang dirensidkan untuk sidang keliling (*zitting plats*) harus diputus semuanya. Namun perkara akan disidangkan untuk sidang keliling tergantung dari perkara yang masuk yang berlokasi di daerah yang direncanakan untuk pelaksanaan sidang keliling. Selain dari itu dipengaruhi alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sidang keliling. Dengan demikian,

target pada Tahun 2024 sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi. Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Pengadilan Militer I-04 Palembang mendapat anggaran dengan total pagu awal Rp4.825.147.000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta seratus empat puluhhh tujuh ribu rupiah) dari anggaran pada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan anggaran pada DIPA Ditjen Badilmiltun Mahkamahh Agung RI sebesar Rp172.680.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pengadilan Militer I-04 Palembang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-04 Palembang dan RPJM 2020 – 2024. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2020 – 2024 Pengadilan Militer I-04 Palembang. Adapun indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	Perbandingan antara Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan Jumlah perkara yang diselesaikan.	Panitera	Laporan Bulanan; Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan Jumlah perkara yang diselesaikan.	Panitera	Laporan Bulanan; Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan Jumlah perkara yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan; Laporan Tahunan

		d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	Nilai Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan yang berasal dari hasil survey Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	Panitera/ Sekretaris	Laporan Triwulan, dan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	Perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.	Panitera	Laporan Bulanan; Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan; Laporan Tahunan

B. Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024

Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 menguraikan dalam pelaksanaan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Adapun reviu untuk Rencana Kinerja Tahunan untuk tahun 2024 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	96%
		d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	92%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Penetapan Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja dibuat berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Adapun tujuan adanya Penetapan Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan atau sanksi.

Pengadilan Militer I-04 Palembang telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Penetapan Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-04 Palembang dan RPJM 2020 – 2024. Adapun Penetapan Kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	
		URAIAN	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	98%
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	96%
		d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	92%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (BUA MARI)	Rp4.825.147.000,-
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun MARI)	Rp172.680.000,-
Total	Rp4.997.870.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2024 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2024 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	85,7%	114,2%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	96%	95,7%	99,7%
		d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	92%	96%	104,3%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%

**PERBANDINGAN KEADAAN PERKARA
TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN 2024**

TAHUN	SISA AWAL	PIDANA		JUMLAH PERKARA	PUTUS	SISA AKHIR TAHUN
		KEJAHATAN	PELANGGARAN			
2020	4	110	27	166	176	4
2021	4	107	19	137	137	4
2022	6	113	31	126	124	6
2023	2	139	9	150	148	2
2024	0	115	4	119	119	0

**GRAFIK PERBANDINGAN KEADAAN PERKARA
TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN 2024**



2. Analisa Akuntabilitas Kinerja

Pada tahun Anggaran 2024, Pengadilan Militer I-04 Palembang telah menetapkan 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai. Ketiga sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Secara garis besar realisasi pada akhir tahun 2024 menunjukkan semua sasaran dicapai dengan baik bila dibandingkan dengan target Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan.

1 Sasaran: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel di pengadilan Militer I-04 Palembang diukur dengan menetapkan 4 Pencapaian target kinerja. Pencapaian target kinerja tahun 2024 dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	a) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	100%	100%	102%
2	b) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	85,7%	114,2%
3	c) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	96%	95,7%	99,7%
4	d) Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	92%	96%	104,3%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

a) *Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024*

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah Perbandingan antara Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan Jumlah perkara yang diselesaikan. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun 2024 sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan sedangkan Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian perkara selamat tahun 2024 dengan jenis perkara Pidana/ kejahatan dan juga pelanggaran lalu lintas. Jumlah perkara yang dihitung adalah jumlah sisa perkara pada tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun 2024 ditambah dengan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2024.

Berikut ini tabel penjelasan jumlah perkara pidana dari sisa akhir tahun 2024 yang harus diselesaikan sampai dengan perkara yang masuk, putus, dan sisa akhir tahun 2024:

Keadaan Perkara Pidana Tahun 2024

Bulan	Sisa Awal	Masuk	Putus	Sisa Akhir
Januari	0	16	2	14
Februari	14	11	7	18
Maret	18	7	9	16
April	16	15	12	19
Mei	19	13	8	24
Juni	24	8	4	28
Juli	28	14	23	19
Agustus	19	7	12	14
September	14	7	6	15
Oktober	15	5	9	11
November	11	12	11	12
Desember	12	-	12	0
Jumlah		115	115	

Sumber : Laporan Keadaan Perkara Dilmil I-04 Palembang

Berikut ini tabel penjelasan jumlah penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dari sisa tahun 2024 sampai dengan perkara yang masuk, putus, dan sisa akhir tahun 2024:

Keadaan Perkara Pelanggaran Tahun 2024

Bulan	Sisa Awal	Masuk	Putus	Sisa Akhir
Januari	0	-	-	-
Februari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-
April	-	-	-	-
Mei	-	1	1	-
Juni	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-
Agustus	-	1	1	-
September	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-
November	-	2	-	2
Desember	2	-	2	0
Jumlah		4	4	

Sumber : Laporan Keadaan Perkara Dilmil I-04 Palembang

Untuk lebih jelasnya 2 tabel tersebut dapat dirangkum dalam table berikut ini :

NO.	DILMIL I-04 PALEMBANG	Sisa Tahun 2023	Perkara Diterima Tahun 2024	Perkara Selesai tahun 2024	Sisa tahun 2024	Ket
1.	Pidana Kejahatan	0	115	115	0	-
2.	Pelanggaran	0	4	4	0	-

Sumber : Laporan Keadaan Perkara Dilmil I-04 Palembang

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkara pidana/ kejahatan dan pelanggaran lalu lintas militer perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2024 berjumlah 119 dengan rincian jumlah perkara meliputi 0 (nol) perkara sisa tahun 2023 yaitu 115 perkara Pidana/ Kejahatan dan 4 perkara pelanggaran lalu lintas. Perkara yang telah diputus pada tahun 2024 berjumlah 119 perkara dengan sisa perkara berjumlah 0 (nihil) perkara. Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Perkara yang diselesaikan tepat waktu	:	119
Jumlah perkara yang diselesaikan (perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan)	:	119
Realisasi	:	$(119/119) \times 100\% = 100\%$
Capaian	:	$(100/100) \times 100\% = 100\%$

Dengan demikian pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dapat dikategorikan melebihi target dengan persentase realisasi sebesar 100% (seratus persen) dengan tingkat capaian 100%. Pencapaian kinerja pada tahun 2024 yang telah menyelesaikan perkara tidak melebihi 5 (lima) bulan dengan persentase 100% (seratus persen) tanpa terdapat perkara pidana maupun pelanggaran militer diselesaikan lebih dari 5 (lima) bulan.

b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian target kinerja pada indikator kinerja Perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024 berbanding sama dengan capaian target kinerja pada indikator kinerja Perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagaimana tabel dan grafik sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	
TARGET	92%	94%	96%	98%	100%	
REALISASI	96,5%	94,6%	100%	100%	100%	
CAPAIAN	104,9%	100,6%	104,2%	102%	100%	

GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2019 S/D 2024



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat Perbandingan Realisasi Kinerja yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir sampai dengan Tahun 2024. Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 realisasi yang didapatkan adalah 96,5% dengan capaian target sebesar 104,9%, pada tahun 2021 realisasi yang didapatkan adalah 94,6% dengan capaian target sebesar 100,6%, pada tahun 2022 realisasi yang didapatkan adalah 100% dengan capaian target sebesar 104,2%, pada tahun 2023 realisasi yang didapatkan adalah 100% dengan capaian target sebesar 102%, dan pada tahun 2024 realisasi yang didapatkan adalah 100% dengan capaian target sebesar 100%. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pencapaian realisasi pada tahun 2024 ini masih mencapai 100% turun 2% dari tahun lalu dan capaian target tertinggi adalah pada tahun 2020. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan persentase target yang semakin meningkat dari 5 tahun terakhir sampai pada tahun 2024.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

berikut ini adalah tabel serta grafik perbandingan realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2020	2021	2022	2024	2024	
TARGET	92%	94%	96%	98%	100%	Memenuhi target jangka menengah
REALISASI	96,5%	94,6%	100%	100%	100%	
CAPAIAN	104,9%	100,6%	104,2%	102%	100%	

GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2020 S/D 2024



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah. Dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 realisasi yang didapatkan adalah 96,5% dengan capaian target sebesar 104,9%, pada tahun 2021 realisasi yang didapatkan adalah 94,6% dengan capaian target sebesar 100,6%, pada tahun 2022 realisasi yang didapatkan adalah 100% dengan capaian target sebesar 104,2%, pada tahun 2023 realisasi yang didapatkan adalah 100% dengan capaian target sebesar 104,2%, dan pada tahun 2024 realisasi yang didapatkan adalah 100% dengan capaian target sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 telah berhasil mencapai 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa capaian target tahun 2024 telah memenuhi target jangka menengah dengan realisasi sebesar 100% dan capaian target sebesar 100%.

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja pada indikator tersebut berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut menjadi acuan dan standar nasional bagi Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dalam penyelesaian perkara. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 Tahun 2014 tersebut disebutkan pada point 1 (satu) bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2024 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung telah memenuhi target yang dapat terlihat pada tabel berikut :

<i>Indikator Kinerja</i>	<i>TARGET</i>		<i>REALISASI</i>	<i>CAPAIAN</i>	<i>Ket</i>
	<i>MARI</i>	<i>SATKER</i>			
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	Memenuhi target Mahkamah agung

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi pencapaian target kinerja Dilmil I-04 Palembang pada indikator kinerja persentase Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 tercapai serta melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 102%. Pencapaian tersebut sejalan dengan harapan Mahkamah Agung agar terciptanya percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Keberhasilan capaian ini tidak terlepas dari baiknya kinerja Hakim dan Panitera serta Aparatur Teknis dan Non Teknis yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai SOP dan selalu berpegang pada peraturan yang berlaku. Disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer 1-04 Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing serta peran dari Kadilmil I-04 Palembang dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan mendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada. Di lihat dari ketersediaan sumber daya manusia di bidang teknis pada Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2024 terdiri dari 8 Hakim Militer termasuk Kadilmil dan Waka Dilmil. Pada tahun ini pula terdapat pergantian/ mutasi beberapa anggota Hakim dan unsur kepaniteraan. Pada sub bagian Kepaniteraan ketersediaan sumber daya manusia di bidang teknis terdiri dari 1 (satu) Panitera, 1 (satu) Panmud Pidana, 1 (satu) Panmud Hukum dan 1 (satu) Panitera Pengganti. Dengan jumlah perkara lebih dari 100 perkara dibandingkan dengan jumlah sumber daya manusia di bidang teknis masih tergolong kurang terlebih pada jumlah panitera pengganti di Dilmil I-04 Palembang.

Namun demikian strategi percepatan penyelesaian perkara dengan sumber daya manusia (Hakim dan Panitera) yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga target kinerja penyelesaian perkara yang tepat waktu dapat terlaksana dengan baik bahkan persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu bisa melebihi target kinerja tahunan.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berjalannya program dan/atau kegiatan yang menjadi komitmen bersama seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang serta beberapa pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat yang diikuti oleh anggota Dilmil I-04 Palembang. Beberapa program kerja serta diklat-diklat baik unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan yang telah dilaksanakan serta diikuti oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung capaian kinerja tahun 2024 antara lain :

1. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024 antara Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
2. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang.
4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan.
5. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang.
6. Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan militer Tinggi I Medan, Dilmiltama Mahkamah Agung RI, dan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

7. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan dalam percepatan penyelesaian perkara thn 2024.
8. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan dalam proses penyelesaian perkara tahun 2024.
9. Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti I Medan dalam memberikan sasaran/ arah tujuan dalam proses percepatan penyelesaian perkara.

2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

a) *Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024*

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding adalah Perbandingan antara Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan Jumlah perkara yang diselesaikan. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum banding sedangkan Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian perkara selama tahun 2024 dengan jenis perkara Pidana/ kejahatan dan juga pelanggaran lalu lintas yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dihitung dengan cara jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun 2024 dikurangi jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding. Berikut ini tabel perhitungan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding:

NO.	DILMIL I-04 PALEMBANG	Putus tahun 2024	Upaya Hukum banding	Tidak mengajukan upaya Hukum Banding	Ket
1.	Jumlah Perkara	119	17	102	-

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah perkara yang putus dan minutasi pada tahun 2024 adalah sebanyak 119 perkara dengan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 17 perkara. Dari hasil rekapitulasi tersebut dilakukan pengurangan dari jumlah perkara yang putus dan minutasi tahun 2024 dengan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2024 sebanyak 102 perkara.

Dari hasil tersebut dapat dilakukan perhitungan untuk menghitung persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2024 dengan perhitungan sebagai berikut berikut:

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	:	102
Jumlah perkara yang diselesaikan (perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan)	:	119
Realisasi	:	$(102/119) \times 100\% = 85,7\%$
Capaian	:	$(85,7/75) \times 100\% = 114,2\%$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 realisasi kinerja yang diperoleh adalah sebesar 85,7% dengan capaian 114,2%. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 Dilmil I-04 Palembang telah mencapai target yang telah ditentukan dan melebihi target yaitu sebesar 114,2%.

b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian target kinerja pada indikator kinerja perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir cenderung bersifat fluktuasi dengan adanya kenaikan dan penurunan besaran capaian kinerja. Berikut dapat dijelaskan jumlah perkara yang diajukan upaya hukum banding dari 5 tahun terkahir :

JUMLAH PERKARA	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	
PUTUS	137	124	148	150	119	
BANDING	9	16	16	29	17	
TIDAK BANDING	128	108	132	121	102	

Sumber : Laporan Keadaan Perkara Dilmil I-04 Palembang

Secara sederhana pengertian Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan pengadilan bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim dan dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan bagi salah satu pihak, dan merasa hasil putusan memihak salah satu pihak. Dengan kata lain rasa kepuasan atas suatu putusan pengadilan itu bersifat subjektif bagi siapapun yang menerimanya maka upaya hukum tidak serta merta dapat ditentukan jumlah perkara dengan pasti. Untuk itu perubahan-perubahan realisasi dari beberapa tahun sebelumnya dapat digambarkan secara singkat melalui tabel dan grafik berikut ini:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	
TARGET	89%	90%	93%	75%	75%	
REALISASI	93,4%	87%	89%	80,6%	85,7%	
CAPAIAN	104,9%	96,7%	95,7%	107,5%	114,2%	

GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN BANDING TAHUN 2019 S/D 2024



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir yang mengalami kenaikan dan penurunan. Dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 realisasi yang didapatkan adalah 93,4% dengan capaian target sebesar 104,9%, pada tahun 2021 realisasi yang didapatkan adalah 87% dengan capaian target sebesar 96,7%, pada tahun 2022 realisasi yang didapatkan adalah 89,19% dengan capaian target sebesar 95,9%, pada tahun 2023 realisasi yang didapatkan adalah 80,6% dengan capaian target sebesar 107,5%, dan pada tahun 2024 realisasi yang didapatkan adalah 85,7% dengan capaian target sebesar 114,2%. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 Dilmil I-04 Palembang telah mencapai target kinerja sebesar 114,2%. Capaian ini merupakan capaian target tertinggi selama 5 tahun terakhir.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

berikut ini adalah tabel serta grafik perbandingan realisasi persentase kinerja perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2024 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	
TARGET	89%	90%	93%	75%	75%	Memenuhi target jangka menengah
REALISASI	93,4%	87%	89%	80,6%	85,7%	
CAPAIAN	104,9%	96,7	95,7%	107,5%	114,2%	

GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN BANDING TAHUN 2020 S/D 2024



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah. Dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 realisasi yang didapatkan adalah 93,4% dengan capaian target sebesar 104,9%, pada tahun 2021 realisasi yang didapatkan adalah 87% dengan capaian target sebesar 96,7%, pada tahun 2022 realisasi yang didapatkan adalah 89% dengan capaian target sebesar 95,9%, pada tahun 2023 realisasi yang didapatkan adalah 80,6% dengan capaian target sebesar 107,5%, dan pada tahun 2024 realisasi yang didapatkan adalah 84% dengan capaian target sebesar 114,2%. Dari hasil perhitungan tersebut tersebut, pada tahun 2024 Dilmil I-04 Palembang telah memenuhi target jangka menengah pada tahun 2024 ini.

d) Membandingkan realisasi tahun ini dengan standar nasional

Target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2024 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis

yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI terdapat perbedaan dimana Mahkamah Agung RI hanya menetapkan target pada tahun 2024 sebesar 50% sedangkan Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan target lebih tinggi yakni sebesar 75%, perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada tabel sebagai berikut :

Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI	CAPAIAN	Ket
	MARI	SATKER			
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	50%	75%	84%	114,2%	Memenuhi target Mahkamah agung

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi pencapaian target kinerja Dilmil I-04 Palembang pada indikator kinerja persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun ini Dilmil I-04 Palembang berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 75% dengan realisasi sebesar 85,7% dan capaian kinerja sebesar 114,2%. Secara umum Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tahun 2024 telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melayani pencari keadilan. Adapun faktor penyebab tercapainya persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding adalah karena masyarakat/ anggota TNI yang berperkara dan Oditur Militer puas terhadap putusan Pengadilan. Para Hakim dan Panitera sebagai tenaga teknis Pengadilan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menghasilkan produk putusan berkualitas dan berkeadilan sesuai penerapan dalam KUHP dan KUHPM serta penerapan Hukum Acara Pidana Militer didalam persidangan sehingga terwujudkan pelayanan yang prima. Akan tetapi upaya hukum merupakan hak Terdakwa dan Oditur Militer sehingga rasa keadilan dirasakan sangat subjektif sehingga siapapun yang mendapatkan putusan tersebut bisa saja merasa adil baginya dan bisa pula merasa tidak puas/ tidak adil baginya sehingga mendorong salah satu pihak untuk melakukan upaya hukum Banding guna mendapatkan rasa kepuasan atas hasil putusan tersebut.

"Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka menunjukkan semakin puas atas putusan Pengadilan" Atas dasar tersebut Dilmil I-04 Palembang telah berusaha memberikan kinerja terbaik dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang telah diterima selama tahun 2024 serta sisa tahun sebelumnya dan diupayakan bahwa capaian target kinerja jangka menengah akan tetap dapat terpenuhi pada tahun berikutnya.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Seperti dijelaskan diatas bahwa rasa keadilan dirasakan sangat subjektif dan tidak bersifat mutlak. Dilmil I-04 Palembang telah melaksanakan tugas sebagaimana yang seharusnya dengan tercapainya target tersebut dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada. Capaian pada indikator kinerja persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada baik pada unsur Hakim dan unsur Kepaniteraan Dengan jumlah perkara yang setiap tahunnya memiliki *trend* meningkat jumlah sumber daya manusia di bidang teknis masih dirasa kurang terlebih pada jumlah panitera pengganti di Dilmil I-04 Palembang.

Namun demikian strategi percepatan penyelesaian perkara dengan sumber daya manusia (Hakim dan Panitera) yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga target persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dapat tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Koordinasi yang baik dari unsur pimpinan dalam percepatan penyelesaian serta dorongan moril kepada seluruh anggota baik di bidang teknis maupun non teknis untuk selalu menjaga integritas dalam pelaksanaan kinerja sehari-hari memberikan motivasi yang baik dalam pelaksanaan kinerja masing-masing anggota Dilmil I-04 Palembang.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berjalannya program dan/atau kegiatan yang menjadi komitmen bersama seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang serta beberapa pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat yang diikuti oleh anggota Dilmil I-04 Palembang. Beberapa program kerja serta diklat-diklat baik unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan yang telah dilaksanakan serta diikuti oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung capaian kinerja tahun 2024 antara lain :

1. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024 antara Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
2. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang.
4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan.
5. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang.
6. Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan militer

Tinggi I Medan, Dilmiltama Mahakamah Agung RI, dan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

7. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan dan hakim dalam percepatan penyelesaian perkara thn 2024.

8. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur kepaniteraan dalam proses penyelesaian perkara thn 2024.

9. Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti I Medan dalam memberikan sasaran/ arah tujuan dalam proses percepatan penyelesaian perkara.

3. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

a) *Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024*

Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan Jumlah perkara yang diselesaikan. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara pada tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum kasasi. Lalu perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama sedangkan Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Proses upaya hukum kasasi berasal dari upaya hukum dari terdakwa atau Oditur setelah ada vonis atau putusan banding dari Pengadilan Tinggi I Medan dan perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Jumlah realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO.	DILMIL I-04 PALEMBANG	Putus tahun 2024	Upaya Hukum Kasasi		Tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	Ket
			(Dari Banding)	Dari TK. I		
1.	Jumlah Perkara	119	9	5	105	-

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah perkara yang putus dan minutasi pada tahun 2024 adalah sebanyak 119 perkara dengan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 14 perkara. Hanya saja dari jumlah upaya hukum tersebut berasal dari upaya hukum dari hasil putusan tingkat Banding ke tingkat kasasi, sedangkan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi dari tingkat pertama berjumlah 5 perkara. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya hukum kasasi lebih banyak berasal dari hasil putusan tingkat banding dibandingkan dengan dari hasil putusan tingkat pertama. Dengan demikian untuk melihat objektifitas capaian kinerja maka yang akan menjadi dasar perhitungan adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari tingkat pertama yaitu berjumlah 114 perkara.

Adapun perhitungan capaian kinerja persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi pada tahun 2024 dengan perhitungan sebagai berikut berikut:

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	: 114
Jumlah perkara yang diselesaikan (perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan)	: 119
Realisasi	: $(114/119) \times 100\% = 95,7\%$
Capaian	: $(95,7/96) \times 100\% = 99,7\%$

Dengan demikian pencapaian target kinerja pada indikator kinerja perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2024 dapat dikategorikan tidak mencapai target dengan persentase realisasi sebesar 95,7% dengan capaian sebesar 99,7% bila dibandingkan dengan target capaian sebesar 96%.

b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

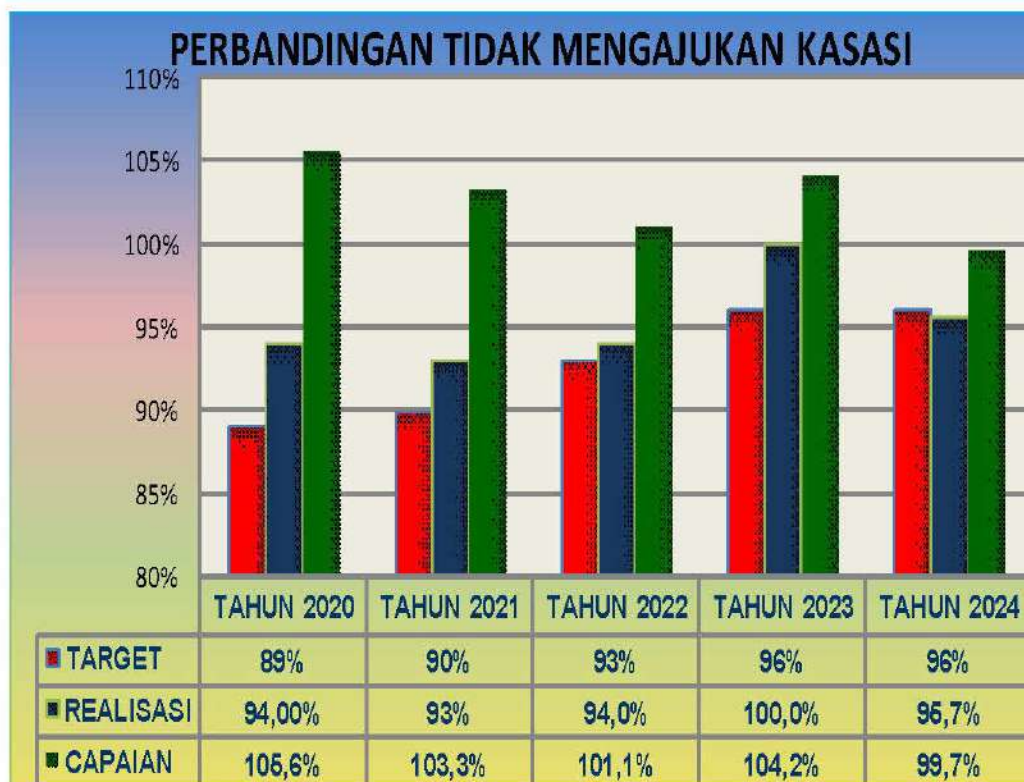
Perbandingan capaian target kinerja pada indikator kinerja perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir cenderung bersifat fluktuasi dengan adanya kenaikan dan penurunan besaran capaian kinerja. Berikut dapat dijelaskan jumlah perkara yang diajukan upaya hukum banding dari 5 tahun terkahir :

JUMLAH PERKARA	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	
PUTUS	137	124	148	150	119	
Kasasi (dari Banding)	14	9	17	14	9	
Kasasi (Dari TK. Pertama)	9	9	1	0	5	

Dari tabel diatas dapat terlihat jumlah upaya hukum kasasi dari beberapa tahun terakhir. Dari hasil tersebut dapat terlihat bahwa pada tahun 2024 capaian kinerja yang tercapai adalah 99,7% mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Hal ini dapat dijelaskan dalam persentase capaian kinerja dari tabel berikut ini:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	
TARGET	89%	90%	93%	96%	96%	
REALISASI	94%	93%	94%	100%	95,7%	
CAPAIAN	105%	103%	101%	104,1%	99,7%	

GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN KASASI TAHUN 2019 S/D 2024



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 realisasi yang didapatkan adalah 93% dengan capaian target sebesar 105%, pada tahun 2021 realisasi yang didapatkan adalah 93% dengan capaian target sebesar 103%, pada tahun 2022 realisasi yang didapatkan adalah 94% dengan capaian target sebesar 101%, pada tahun 2023 realisasi yang didapatkan adalah 100% dengan capaian target sebesar 104,2%, dan pada tahun 2024 realisasi yang didapatkan adalah 95,7% dengan capaian target sebesar 99,7% Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pencapaian realisasi pada tahun 2024 ini adalah capaian target terendah bila dibandingkan dengan pencapaian realisasi dari 5 tahun terakhir.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

berikut ini adalah tabel serta grafik perbandingan realisasi persentase kinerja perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2024 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	
TARGET	89%	90%	93%	96%	96%	Tidak Mencapai target jangka menengah
REALISASI	94%	93%	94%	100%	95,7%	
CAPAIAN	105%	103%	101%	104,2%	99,7%	

GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN KASASI TAHUN 2020 S/D 2024



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah. Pada tahun 2020 realisasi yang didapatkan adalah 94% dengan capaian target sebesar 105%, pada tahun 2021 realisasi yang didapatkan adalah 93% dengan capaian target sebesar 103%, pada tahun 2022 realisasi yang didapatkan adalah 94% dengan capaian target sebesar 101%, pada tahun 2023 realisasi yang didapatkan adalah 100% dengan capaian target sebesar 104,2%, dan pada tahun 2024 realisasi yang didapatkan adalah 95,7% dengan capaian target sebesar 99,7%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2024 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan target jangka menengah dari tahun 2020 sampai dengan 2024.

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2024 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI terdapat perbedaan dimana Mahkamah Agung RI hanya menetapkan target pada tahun 2024 sebesar 50% sedangkan Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan target lebih tinggi yakni sebesar 96%, perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada tabel sebagai berikut :

Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI	CAPAIAN	Ket
	MARI	SATKER			
Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi	50%	96%	95,7%	99,7%	Memenuhi target Mahkamah agung

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi pencapaian target kinerja Dilmil I-04 Palembang pada indikator kinerja persentase kinerja perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tahun 2024 tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 99,7%. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa upaya hukum merupakan hak Terdakwa dan Oditur Militer bilamana dirasa dari hasil putusan tersebut terdapat ketidak-puasan atas hasil putusan yang dibacakan sehingga rasa keadilan dirasakan sangat subjektif.

Pada pelaksanaannya para Hakim dan Panitera sebagai tenaga teknis Pengadilan sudah berupaya secara maksimal untuk menghasilkan produk putusan berkualitas dan berkeadilan sesuai penerapan dalam KUHP dan KUHPM serta penerapan Hukum Acara Pidana Militer didalam persidangan sehingga terwujudkan pelayanan yang prima. Dengan berpegang bahwa, "**Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka menunjukkan semakin puas atas putusan Pengadilan**" Dilmil I-04 Palembang telah melaksanakan tugas sebagaimana yang seharusnya. Diupayakan bahwa capaian target kinerja jangka menengah dapat terpenuhi pada tahun berikutnya.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Seperti dijelaskan diatas bahwa rasa keadilan dirasakan sangat subjektif dan tidak bersifat mutlak. Dilmil I-04 Palembang telah berusaha melaksanakan tugas sebagaimana yang seharusnya walaupun tidak tercapainya target tersebut pada tahun 2024. Tidak tercapainya indikator kinerja persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi tidak terlepas dari rasa ketidakpuasan atas suatu putusan dan seluruh pihak yang berperakara memiliki hak untuk melakukan upaya hukum dalam memuaskan rasa keadilan yang dimiliki. Atas dasar tersebut Dilmil I-04 Palembang telah berupaya menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan aturan yang berlaku. Efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada baik pada unsur Hakim dan unsur Kepaniteraan Dengan jumlah upaya hukum yang setiap tahunnya memiliki *trend* meningkat jumlah sumber daya manusia di bidang teknis masih dirasa kurang terlebih pada jumlah panitera pengganti di Dilmil I-04 Palembang.

Namun demikian strategi percepatan penyelesaian perkara dengan sumber daya manusia (Hakim dan Panitera) yang tersedia dapat menghasilkan produk putusan berkualitas dan berkeadilan sesuai penerapan dalam KUHP dan KUHPM yang sudah dilaksanakan se-optimal mungkin oleh sumber daya manusia di Dilmil I-04 Palembang sehingga target kinerja penyelesaian perkara yang tepat waktu dan kedepannya dapat terlaksana dengan baik sesuai target kinerja tahunan serta dilakukan evaluasi target capaian kinerja agar tahun yang akan datang dapat tercapai dengan baik.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berjalannya program dan/atau kegiatan yang menjadi komitmen bersama seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang serta beberapa pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat yang diikuti oleh anggota Dilmil I-04 Palembang. Beberapa program kerja serta diklat-diklat baik unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan yang telah dilaksanakan serta diikuti oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung capaian kinerja tahun 2024 antara lain :

1. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024 antara Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
2. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang.
4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan.

5. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang.
6. Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan militer Tinggi I Medan, Dilmiltama Mahakamah Agung RI, dan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.
7. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan dan hakim dalam percepatan penyelesaian perkara thn 2024.
8. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur kepaniteraan dalam proses penyelesaian perkara thn 2024.
9. Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti I Medan dalam memberikan sasaran/ arah tujuan dalam proses percepatan penyelesaian perkara.

4. INDEX PERSEPSI STAKEHOLDER YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN

a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan adalah index yang dihasilkan dari hasil pengisian survei kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan/ pengunjung di Dilmil I-04 Palembang. Secara garis besar masyarakat yang dimaksud adalah semua masyarakat pengguna layanan di Dilmil I-04 Palembang , antara lain pengunjung sidang, para saksi, para pencari keadilan, satuan samping (Otmil I-05 Palembang, Pomdam II/Swj, Lanal Palembang, Topdam II/Swj, Kumdam II/Swj, PTTUN Palembang, BNN Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Polresta Palembang). Survei dilaksanakan selama para pengunjung hadir di lingkungan Dilmil I-04 Palembang secara langsung ataupun jikalau dalam pelaksanaan sidang keliling para penerima layanan diberikan angket survei untuk melihat pelayanan yang telah dilakukan oleh Dilmil I-04 Palembang. Survei ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang besar kepada perubahan yang lebih baik dalam pelaksanaan kinerja Dilmil I-04 Palembang.

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

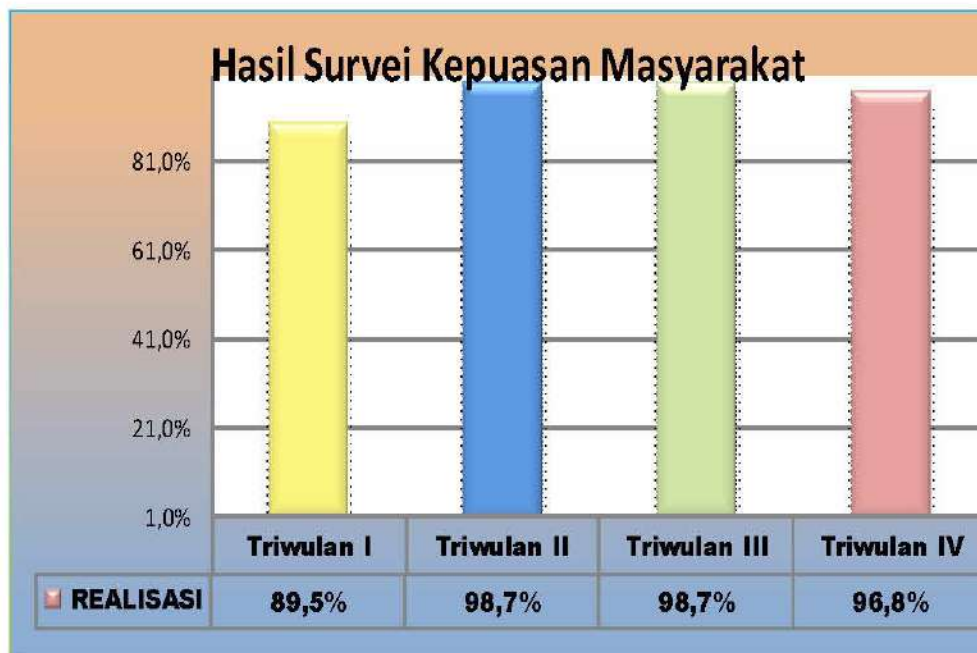
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Rekapitulasi hasil survei ini terbagi atas 4 waktu pelaksanaan yaitu survei pada Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV. Jumlah survei yang dikumpulkan pada setiap triwulannya diupayakan semaksimal mungkin dengan sistem *simple random sampling* atau dengan kata lain pengambilan secara acak kepada para masyarakat penerima layanan. Perhitungan capaian realisasi survei pada tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel dan grafik berikut ini:

Index Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan (TW I + TW II + TW III + TW IV)	: 89,5+98,7+98,7+96,8
Realisasi (Jumlah TW I sampai TW IV Dibagi 4)	: 96
Capaian	: $(96/92) \times 100 = 104,3\%$



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat nilai dari hasil survei kepuasan masyarakat pada setiap triwulan pada tahun 2024, Pada triwulan I nilai survei kepuasan masyarakat adalah 89,5%, pada triwulan II nilai survei kepuasan masyarakat adalah 98,7%, pada triwulan III nilai survei kepuasan masyarakat adalah 98,7%, dan pada triwulan IV nilai survei kepuasan masyarakat adalah 96,8%, Dari hasil tersebut dilakukan penjumlahan dari tiap-tiap triwulan dan menghasilkan nilai realisasi sebesar 96% yang kemudian hasil tersebut dibandingkan dengan target capaian dan hasilnya adalah sebesar 104,3%, Dengan demikian pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2024 dapat dikategorikan melebihi target dengan persentase realisasi sebesar 96% dengan tingkat capaian target 104,3%,

b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian target kinerja pada indikator kinerja index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir cenderung meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya, Hal ini dapat digambarkan melalui tabel dan grafik berikut ini:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	
TARGET	89	90	91	92	92	
REALISASI	92,15	92,25	91,7	92,5	96	
CAPAIAN	103,5	102,5	100,1	100,5	104,3	

GRAFIK PERBANDINGAN INDEX PERSEPSI STAKEHOLDER YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN TAHUN 2018 S/D 2024



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 realisasi yang didapatkan adalah 92,15 dengan capaian target sebesar 103,5, pada tahun 2021 realisasi yang didapatkan adalah 92,27 dengan capaian target sebesar 102,5, pada tahun 2022 realisasi yang didapatkan adalah 91,13 dengan capaian target sebesar 100,1, pada tahun 2023 realisasi yang didapatkan adalah 92,5 dengan capaian target sebesar 100,5 , dan pada tahun 2024 realisasi yang didapatkan adalah 96 dengan capaian target sebesar 104,3. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pencapaian realisasi pada tahun 2024 adalah pencapaian tertinggi bila dibandingkan dengan pencapaian realisasi dari 5 tahun terakhir namun untuk capaian target terendah adalah pada tahun 2022.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

berikut ini adalah tabel serta grafik perbandingan realisasi persentase kinerja index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2024 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2020	2021	2024	2024	2024	
TARGET	89	90	91	92	92	Memenuhi target jangka menengah
REALISASI	92,15	92,27	91,07	92,5	96	
CAPAIAN	103,5	102,5	100,1	100,5	104,3	

GRAFIK PERBANDINGAN INDEX PERSEPSI STAKEHOLDER YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN TAHUN 2020 S/D 2024



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah. Pada tahun 2020 realisasi yang didapatkan adalah 92,15 dengan capaian target sebesar 103,5%, pada tahun 2021 realisasi yang didapatkan adalah 92,27 dengan capaian target sebesar 102,5%, pada tahun 2022 realisasi yang didapatkan adalah 91,13 dengan capaian target sebesar 100,1%, pada tahun 2023 realisasi yang didapatkan adalah 92,5 dengan capaian target sebesar 100,5%, dan pada tahun 2024 realisasi yang didapatkan adalah 96 dengan capaian target sebesar 104,3%, bila dibandingkan dengan capaian target tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan target jangka menengah dari tahun 2020 sampai dengan 2024, Dari hasil tersebut dapat dikatakan pencapaian pada tahun 2024 telah memenuhi target jangka menengah dengan capaian target sebesar 104,3%,

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/Sek/SK/II/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditetapkan bahwa nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM index harus lebih dari 80, Berdasarkan Keputusan

Sekma tersebut target kinerja pada indikator kinerja index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2024 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI terdapat perbedaan dimana Mahkamah Agung RI hanya menetapkan target pada tahun 2024 dengan nilai IKM sebesar 80 sedangkan Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan target lebih tinggi dengan nilai IKM sebesar 92, perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada tabel sebagai berikut :

<i>Indikator Kinerja</i>	<i>TARGET</i>		<i>REALISASI</i>	<i>CAPAIAN</i>	<i>Ket</i>
	<i>MARI</i>	<i>SATKER</i>			
Persentase Hasil Survei IKM	80%	92%	96%	104,3%	Memenuhi target Mahkamah Agung

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi pencapaian target kinerja Dilmil I-04 Palembang pada indikator kinerja Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 104,3%, Dilmil I-04 Palembang telah berupaya dalam memberikan pelayanan terbaik dalam memberikan keterbukaan informasi pada tahun 2024 Dilmil I-04 Hal ini dibuktikan dengan diraihnya Penghargaan Mahkamah Agung RI tahun 2024 yaitu Juara II Keterbukaan Informasi dilingkungan Peradilan Militer Tipe A. Akan tetapi perlunya analisis indeks kepuasan masyarakat yang memiliki nilai terendah pada tahun 2024. Selain itu Dilmil I-04 Palembang juga selalu memberikan keterbukaan informasi melalui media social, *website*, aplikasi pelayanan, banner dan spanduk, serta inovasi penempelan stiker pelayanan di beberapa satuan kerja yang berhubungan langsung dengan pelayanan Dilmil I-04 Palembang.

**Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran Indeks
Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Militer I-04 Palembang**

No,	Ruang Lingkup	Rata-rataSkor				Kategori	Peringkat
		TW I	TW II	TW III	TW IV		
1,	Persyaratan	3,433	3,947	3,947	3,950	SANGAT BAIK	7
2,	Sistem Mekanisme, Prosedur	3,433	3,968	3,968	3,813	SANGAT BAIK	8
3,	Waktu Penyelesaian	3,433	3,968	3,968	3,727	SANGAT BAIK	9
4,	Biaya/Tarif	3,800	3,968	3,957	4,000	SANGAT BAIK	2
5,	Produk Spesifikasi JenisPelayanan	3,467	3,968	3,968	3,950	SANGAT BAIK	6
6,	Kompetensi Pelaksana	3,433	3,968	3,968	3,475	SANGAT BAIK	5
7,	Perilaku Pelaksana	3,633	3,968	3,968	4,000	SANGAT BAIK	4
8,	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,667	3,830	3,830	3,950	SANGAT BAIK	3
9,	Sarana dan Prasarana	3,933	3,968	3,968	4,000	SANGAT BAIK	1

Dari tabel diatas dapat terlihat peringkat dari yang tertinggi sampai terendah dalam penilaian masyarakat atas pelayanan Dilmil I-04 Palembang, Nilai tertinggi ada pada indikator sarana dan prasarana yang ada di Dilmil I-04 Palembang, Salah satu yang menjadi unggulan adalah adanya ruang istirahat berupa gazebo, ruang bermain anak, kantin kejujuran, *Access to Justice* yang *up to date* dengan menggunakan media sosial dan aplikasi berbasis web serta pelayanan pengadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, Sedangkan nilai terendah ada pada indikator waktu penyelesaian dimana pada bagian tersebut memiliki pertanyaan “Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?”, Dari hasil survei ditemukan bahwa salah satu yang menjadi penilaian masyarakat adalah ketidaktepatan dalam waktu pelaksanaan sidang dengan jadwal yang telah disampaikan,

Pelaksanaan persidangan tidak terlepas dari elemen-elemen yang mendukung pelaksanaan sidang selain petugas peradilan seperti Oditur, Penasehat Hukum, para saksi, dan terdakwa itu sendiri, Secara garis besar Dilmil I-04 Palembang telah menetapkan waktu yang terbaik dalam pelaksanaan sidang hanya saja kadang kala sidang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya dikarenakan beberapa pihak yang ikut dalam pelaksanaan sidang tersebut belum hadir tepat pada waktunya, Untuk itu Kadilmil dalam monitoring dan evaluasi kinerja memberikan himbauan agar pelaksanaan persidangan dapat dilaksanakan tepat waktu serta jangan sampai keterlambatan disebabkan oleh anggota Dimil I-04 Palembang itu sendiri seperti majelis hakim, panitera

pengganti maupun petugas sidang, Selain itu Kadilmil mengingatkan tentang proses administrasi perkara dan administrasi persidangan dibuat sesuai dengan format yang benar, Upaya-upaya ini telah dilakukan dan akan dilakukan terus kedepannya dengan harapan dapat memberikan *outcome* yang baik bagi masyarakat pengguna layanan di Dilmil I-04 Palembang,

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada saat ini Dilmil I-04 Palembang telah berupaya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat pencari keadilan ataupun pengunjung yang datang di Dilmil I-04 Palembang, Sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di bidang teknis seperti Hakim dan Panitera telah berupaya dalam memberikan pelayanan dalam menghasilkan produk putusan berkualitas dan berkeadilan sesuai penerapan dalam KUHP dan KUHPM yang sudah dilaksanakan, Sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di bidang non teknis juga telah berupaya terbaik dalam melakukan pelayanan dengan mengupayakan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan Pengadilan secara umum dan memerikan rasa nyaman bagi masyarakat ataupun pengunjung sidang,

Beberapa penilaian yang cenderung positif ada pada sarana dan prasarana yang ada pada Dilmil I-04 Palembang, Nilai tertinggi ke dua ada pada tarif pelayanan karena Dilmil I-04 Palembang tidak menetapkan tariff/ gratis dan tidak melakukan pungutan selain yang telah ditetapkan, Nilai tertinggi ke 3 ada pada perilaku pelaksana atau secara keseluruhan anggota di Dilmil I-04 Palembang, Hal ini menggambarkan seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang telah mampu menjaga marwah Mahkamah Agung RI secara khusus profesionalisme Dilmil I-04 Palembang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab,

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berjalannya program dan/atau kegiatan yang menjadi komitmen bersama seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang serta beberapa pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat yang diikuti oleh anggota Dilmil I-04 Palembang, Beberapa program kerja serta diklat-diklat baik unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan yang telah dilaksanakan serta diikuti oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung capaian kinerja tahun 2024 antara lain :

- 1, Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024 antara Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan,

- 2, Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian,
- 3, Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang,
- 4, Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan,
- 5, Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang,
- 6, Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan militer Tinggi I Medan, Dilmiltama Mahkamah Agung RI, dan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI,
- 7, Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan dan hakim dalam percepatan penyelesaian perkara thn 2024,
- 8, Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur kepaniteraan dalam proses penyelesaian perkara thn 2024,
- 9, Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti I Medan dalam memberikan sasaran/ arah tujuan dalam proses percepatan penyelesaian perkara,

2

Sasaran: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a, *Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu,*

Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan Jumlah perkara yang diselesaikan (perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan), Berikut ini tabel perbandingan pencapaian target kinerja Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu:

Bulan	Putus	Dikirim ke Oditur dan Terdakwa	Ket
Januari	16	16	
Februari	11	11	
Maret	7	7	
April	15	15	
Mei	13	13	
Juni	8	8	
Juli	14	14	
Agustus	7	7	
September	7	7	
Oktober	5	5	
November	12	12	
Desember	12	12	
Jumlah	119	119	

Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu	:	119
Jumlah putusan	:	119
Realisasi	:	$(119/119) \times 100\% = 100\%$
Capaian	:	$(100/100) \times 100\% = 100\%$

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu	100 %	100 %	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan persentase Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu adalah 100% sehingga jika dibandingkan dengan target realisasi sebesar 100% maka menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%: Dengan demikian pencapaian target kinerja pada indikator Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu pada tahun 2024 dapat dikategorikan mencapai target dengan persentase realisasi sebesar 100% dengan tingkat realisasi capaian 100% bila dibandingkan dengan target capaian sebesar 100%,

b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian target kinerja pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu pada tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir cenderung sama dengan tahun-tahun sebelumnya, Hal ini dapat digambarkan melalui tabel dan grafik berikut ini:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	
TARGET	100%	100%	100%	100%	100%	
REALISASI	100%	100%	100%	100%	100%	
CAPAIAN	100%	100%	100%	100%	100%	

**GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE
PARA PIHAK TEPAT WAKTU TAHUN 2020 S/D 2024**



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Dari tabel tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa Dilmil I-04 Palembang selama 5 tahun terakhir dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dengan realisasi selama 5 tahun berturut-turut sebesar 100% dengan target 100% serta realisasi capaian sebesar 100%,

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

berikut ini adalah tabel serta grafik perbandingan persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu tahun 2024 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2020	2021	2024	2024	2024	
TARGET	100%	100%	100%	100%	100%	Memenuhi target jangka menengah
REALISASI	100%	100%	100%	100%	100%	
CAPAIAN	100%	100%	100%	100%	100%	

**GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE
PARA PIHAK TEPAT WAKTU TAHUN 2020 S/D 2024**



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat perbandingan persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu tahun 2024 dengan tahun lalu dan target jangka menengah, dari tabel tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa Dilmil I-04 Palembang selama 3 tahun terakhir dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dengan realisasi selama 3 tahun berturut-turut sebesar 100% dengan target 100% serta realisasi capaian sebesar 100%,

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Capaian pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2024 berpedoman pada standar nasional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, pada point 2 (dua) dinyatakan bahwa “untuk perkara Pidana Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP”, Dengan demikian target kinerja pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2024 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI terdapat perbedaan dimana Mahkamah Agung RI hanya menetapkan target pada tahun 2024 sebesar 20% sedangkan Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan target maksimal yakni sebesar 100%, perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada tabel sebagai berikut :

Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI	CAPAIAN	Ket
	MARI	SATKER			
persentase salinan putusan yang disampaikan kepada pihak tepat waktu	20%	100%	100%	100%	Memenuhi target Mahkamah Agung

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi pencapaian target kinerja Dilmil I-04 Palembang pada indikator kinerja persentase kinerja salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2024 mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 100% bahkan bernilai sama dengan capaian tahun-tahun sebelumnya dan memenuhi target jangka menengah, Keberhasilan capaian ini juga tidak terlepas dari baiknya kinerja Hakim dan Panitera serta Aparatur Teknis dan Non Teknis yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai SOP dan selalu berpegang pada peraturan yang berlaku, Disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer 1-04 Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bagian merupakan faktor penting serta peran penting dari Kadilmil I-04 Palembang dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan serta kinerja seluruh anggota dalam mendukung terpenuhinya target kinerja tersebut,

Pencapaian indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dengan capaian 100% (seratus persen) pada tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan Aparatur Teknis dan Non Teknis pada Pengadilan Militer I-04 Palembang konsisten dalam pelaksanaan indikator kinerja tersebut berpedoman pada SEMA Nomor 01 Tahun 2011, Selain itu disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bagian merupakan faktor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut,

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada saat ini Dilmil I-04 Palembang telah berupaya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat pencari keadilan ataupun pengunjung yang datang di Dilmil I-04 Palembang, Sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di bidang teknis seperti Hakim dan Panitera telah berupaya dalam memberikan pelayanan dalam menghasilkan produk putusan berkualitas dan berkeadilan sesuai penerapan dalam KUHP dan KUHPM yang sudah dilaksanakan, Sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di bidang non teknis juga telah berupaya terbaik dalam melakukan pelayanan dengan mengupayakan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan Pengadilan secara umum dan memerikan rasa nyaman bagi masyarakat ataupun pengunjung sidang,

Pada Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu telah diupayakan oleh Dilmil I-04 Palembang dalam pelaksanaannya, Dengan sumber daya manusia yang tersedia pada bagian persuratan maupun pada bagian pengarsipan dapat berjalan dengan baik walaupun pada saat ini Dilmil I-04 Palembang belum memiliki ASN fungsional dalam bidang Arsiparis tetapi dengan kekuatan anggota yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dengan pembagian tugas secara proporsional, Dengan komposisi tenaga teknis dan non teknis tersebut pada tahun 2024 Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat menyampaikan salinan putusan dari semua perkara yang ditangani sebanyak 119 (seratus sembilan belas perkara) perkara tanpa ada salinan putusan yang terlambat dalam penyampiaannya kepada Oditur ataupun terdakwa,

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berjalannya program dan/atau kegiatan yang menjadi komitmen bersama seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang serta beberapa pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat yang diikuti oleh anggota Dilmil I-04 Palembang, Beberapa program kerja serta diklat-diklat baik unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan yang telah dilaksanakan serta diikuti oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung capaian kinerja tahun 2024 antara lain :

- 1, Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024 antara Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan,
- 2, Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian,
- 3, Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang,

- 4, Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan,
- 5, Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang,
- 6, Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan militer Tinggi I Medan, Dilmiltama Mahakamah Agung RI, dan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI,
- 7, Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan dan hakim dalam percepatan penyelesaian perkara thn 2024,
- 8, Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur kepaniteraan dalam proses penyelesaian perkara thn 2024,
- 9, Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti I Medan dalam memberikan sasaran/ arah tujuan dalam proses percepatan penyelesaian perkara

3

Sasaran: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a) *Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan,*

Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang harus di rensid (rencana sidang) di luar Gedung Pengadilan, Persentase Perkara yang diselesaikan di luar n sidang di Luar Gedung Kantor dapat diputus sebanyak 19 (sembilan belas) pGedung Pengadilan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 100 %, Perkara yang direncanakaerkarza dari 19 (zzSembilan belas) perkara yang di rensidkan, Berikut adalah tabel pelaksanaan sidang keliling pada tahun 2024:

Bulan	Dirensid	Putus	Ket
Januari	-	-	
Februari	-	-	
Maret	-	-	
April	6	6	
Mei	5	5	
Juni	-	-	
Juli	10	10	
Agustus	-	-	
September	-	-	
Oktober			
November	-	-	
Desember	-	-	
Jumlah	21	21	

Dari data diatas dapat diketahui terdapat 21 perkara yang telah dilaksanakan diluar gedung pengadilan Dilmil I-04 Palembang, Dapat dijelaskan bahwa terdapat 6 perkara yang dilaksanakan sidang keliling pada bulan April 2024 dilaksanakan di PTUN Pangkal Pinang, pada bulan Mei 2024 dilaksanakan pada UPT Otmil Bandar Lampung sebanyak (5 perkara), Kemudian sidang diluar gedung pengadilan dilaksanakan pada bulan Juli 2024 sebanyak 10 perkara yang dilaksanakan di PTUN Bengkulu, Dari hasil tersebut, langkah selanjutnya adalah perhitungan capaian target selama tahun 2024 dengan perhitungan sebagai berikut,

Jumlah putusan	:	21
Jumlah Perkara yang di rensid	:	21
Realisasi	:	(21/21) x 100% = 100%
Capaian	:	(100/100) X 100% = 100%

Dari tabel tersebut dapat dilihat jumlah perkara yang telah dirensid sebanyak 21 perkara dan perkara yang telah berhasil diputus adalah sebanyak 21 Perkara, Dari hasil tersebut maka dapat dilakukan perhitungan perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dibagi dengan jumlah perkara yang di rensidkan dikalikan 100% yang menghasilkan realisasi sebesar 100%, Lalu setelah dibandingkan dengan target capaian maka menghasilkan capaian sebesar 100%, Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Dilmil I-04 Palembang telah mencapai target yang telah ditentukan,

b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir cenderung sama dengan tahun-tahun sebelumnya, Hanya saja pada tahun 2021 menjadi pencapaian terkecil selama 5 tahun terakhir, Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel dan grafik berikut ini:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	
TARGET	100%	100%	100%	100%	100%	
REALISASI	100%	91%	100%	100%	100%	
CAPAIAN	100%	91%	100%	100%	100%	

**GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DI
LUAR GEDUNG PENGADILAN TAHUN 2020 S/D 2024**



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Dari tabel tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa Dilmil I-04 Palembang pada tahun 2020 sampai 2024 dapat memenuhi target yang telah ditetapkan akan tetapi pada tahun 2021 tidak dapat memenuhi target tersebut, Pada tahun 2024 Dilmil I-04 Palembang berhasil mencapai target dengan capaian target sebesar 100%,

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

berikut adalah tabel serta grafik perbandingan Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan tahun 2024 dengan target jangka menengah dapat dijelaskan melalui tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2020	2021	2022	2023	2024	
TARGET	100%	100%	100%	100%	100%	Memenuhi target jangka menengah
REALISASI	100%	91%	100%	100%	100%	
CAPAIAN	100%	91%	100%	100%	100%	

**GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN
DILUAR GEDUNG PENGADILAN TAHUN 2020 S/D 2024**



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat perbandingan persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu tahun 2024 dengan tahun lalu dan target jangka menengah, dari tabel tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa Dilmil I-04 Palembang pada tahun 2020, 2022, 2023, dan 2024 dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dengan capaian target sebesar 100%, Sedangkan pada tahun 2021 Dilmil I-04 Palembang tidak dapat memenuhi capaian target dengan capaian target sebesar 91%,

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (sidang keliling) pada Pengadilan Militer I-05 Palembang dilaksanakan sesuai standar nasional yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Capaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (sidang keliling) pada Pengadilan Militer I-05 Palembang tahun 2024 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI adalah sama bahwa Mahkamah Agung RI menetapkan target pada tahun 2024 sebesar 100% demikian pula Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan target maksimal sebesar 100%, perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada tabel sebagai berikut :

Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI	CAPAIAN	Ket
	MARI	SATKER			
persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	Memenuhi target Mahkamah Agung

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi pencapaian target kinerja Dilmil I-04 Palembang pada indikator kinerja persentase kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2024 memenuhi target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 100%. Keberhasilan capaian ini juga tidak terlepas dari baiknya kinerja Hakim dan Panitera serta Aparatur Teknis dan Non Teknis yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai SOP dan selalu berpegang pada peraturan yang berlaku, Disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer 1-04 Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bagian merupakan faktor penting serta peran penting dari Kadilmil I-04 Palembang dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan serta kinerja seluruh anggota dalam mendukung terpenuhinya target kinerja tersebut, Dilmil I-04 Palembang telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mencapai serta mempertahankan capaian kinerja yang telah baik selama beberapa tahun terakhir ini dengan harapan capaian tersebut dapat tercapai kembali di tahun-tahun berikutnya,

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada saat ini Dilmil I-04 Palembang telah berupaya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat pencari keadilan ataupun pengunjung yang datang di Dilmil I-04 Palembang, Sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di bidang teknis seperti Hakim dan Panitera telah berupaya dalam memberikan pelayanan dalam menghasilkan produk putusan berkualitas dan berkeadilan sesuai penerapan dalam KUHP dan KUHPM yang sudah dilaksanakan, Sumber daya manusia yang melaksanakan tugas di bidang non teknis juga telah berupaya terbaik dalam melakukan pelayanan dengan mengupayakan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan Pengadilan secara umum dan memerikan rasa nyaman bagi masyarakat ataupun pengunjung sidang,

Pada Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan telah diupayakan oleh Dilmil I-04 Palembang dalam pelaksanaannya, Dengan sumber daya manusia (Hakim dan Panitera) yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dengan

pembagian tugas penyelesaian perkara secara proporsional, Kadilmil dan Wakadilmil juga melaksanakan persidangan sesuai komposisi Majelis Hakim yang tersedia di unit kerja sehingga mampu mewujudkan pencapaian target kinerja tahunan yang telah ditetapkan, Capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (sidang keliling) tersebut tidak terlepas pula dukungan kinerja para Staf baik pada bagian Kepaniteraan maupun pada bagian Kesekretariatan yang berada di satuan ketika sidang keliling dilaksanakan, seperti penginputan data perkara pada aplikasi SIPP harus dilakukan di satuan, Dengan kerjasama semua bagian tersebut capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (sidang keliling) tahun 2024 dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan,

Hanya saja dalam pelaksanaannya tidak didukung dengan anggaran yang memadai, Pada tahun ini Dilmil I-04 Palembang mendapat anggaran sidang diluar gedung pengadilan sebesar Rp101,000,000,- (seratus satu juta rupiah) yang pada keadaan riilnya hanya dapat melaksanakan sidang diluar gedung pengadilan sebanyak 3 kali saja, Maka dari itu diharapkan adanya penambahan anggaran agar Dilmil I-04 Palembang dapat melaksanakan sidang diluar gedung pengadilan sebanyak 4 kali mengingat Dilmil I-04 Palembang memiliki wilayah yurisdiksi sebanyak 5 provinsi,

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berjalannya program dan/atau kegiatan yang menjadi komitmen bersama seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang serta beberapa pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat yang diikuti oleh anggota Dilmil I-04 Palembang, Beberapa program kerja serta diklat-diklat baik unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan yang telah dilaksanakan serta diikuti oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung capaian kinerja tahun 2024 antara lain :

- 1, Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2024 antara Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan;
- 2, Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian;
- 3, Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang;
- 4, Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan;
- 5, Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang;

- 6, Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI, Dilmiltama, dan Pengadilan militer Tinggi I Medan;
- 7, Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan dan hakim dalam percepatan penyelesaian perkara thn 2024;
- 8, Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur kepaniteraan dalam proses penyelesaian perkara thn 2024; dan
- 9, Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti I Medan dalam memberikan sasaran/ arah tujuan dalam proses percepatan penyelesaian perkara,

B, REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan indikator-indikator kinerja yang berorientasi hasil di atas, maka diperlukan adanya program kerja yang dapat menghasilkan *outcome* dan *output*. Program kerja Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh unit eselon I Mahkamah Agung RI, dimana ada terdapat 3 (tiga) program kerja yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja Dilmil I-04 Palembang, 3 (tiga) Program Kerja yang harus dilakukan tersebut antara lain :

- 1, Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN);
- 2, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
- 3, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, Dalam pelaksanaan program kerja tersebut Dilmil I-04 Palembang mendapat 2 (dua) jenis Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) yaitu DIPA yang berasal dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung (DIPA 01) dan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (DIPA 05)

1, PENGELOLAAN KEUANGAN

A, Pengelolaan Keuangan DIPA 01 (BUA)

Dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang No,17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara yang bertujuan menyempurnakan manajemen belanja Negara guna peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan, Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai salah satu instansi Pemerintah yang berada dalam Lingkungan Mahkamah Agung, pada awal tahun anggaran 2024 telah menerima "DIPA PETIKAN ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2024" dengan Nomor : 005-01-2-663211/2024 tanggal 24 November 2023 dengan PAGU sebesar Rp,

4,825,147,000,00 (empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta seratus empat puluhhh tujuh ribu rupiah), dalam kurun waktu 2024 DIPA BUA mengalami 9 (sembilan) kali Revisi DIPA yang terdiri dari :

- Revisi ke 1 (satu) pada tanggal 19 Januari 2024
- Revisi ke 2 (dua) pada tanggal 23 April 2024
- Revisi ke 3 (tiga) pada tanggal 7 Juni 2024
- Revisi ke 4 (empat) pada tanggal 10 Juli 2024
- Revisi ke 5 (lima) pada tanggal 2 September 2024
- Revisi ke 6 (enam) pada tanggal 16 Oktober 2024
- Revisi ke 7 (tujuh) pada tanggal 4 November 2024
- Revisi ke 8 (delapan) pada tanggal 4 Desember 2024
- Revisi ke 9 (sembilan) pada tanggal 17 Desember 2024

a, Belanja Pegawai

Data penyerapan anggaran belanja pegawai Tahun 2024 Pengadilan Militer I-04 Palembang :

No	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%	Ket
-	3,287,219,000	3,240,319,363	46,899,637	98,57	

b, Belanja Barang

Data penyerapan anggaran belanja barang tahun 2024 Pengadilan Militer I-04 Palembang :

No	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%	Ket
-	1,519,946,000	1,514,912,312	5,033,688	99,67	

c, Belanja Modal

Data penyerapan anggaran belanja modal tahun 2024 Pengadilan Militer I-04 Palembang :

No	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%	Ket
-	17,982,000	17,960,000	22,000	99,86	

Bahwa realisasi penyerapan Anggaran DIPA (01) BUA MARI Tahun 2024 berdasarkan tabel diatas adalah sebesar Rp 4,773,191,675,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan realisasi sebesar 98,92 % (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh dua) dengan sisa pagu sebesar Rp 51,955,325 (lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) atau 1,08 % (satu koma nol delapan) persen,

2, Pengelolaan Keuangan DIPA 05 (Direktorat Badilmiltun)

Data penyerapan pengelolaan anggaran untuk DIPA 05 (Ditjen) Badilmiltun MA RI TA, 2024 Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%	Ket
1,	Belanja Opr Perkara	71,680,000	69,181,500	2,498,500	96,51	
2,	Sidang Keliling	101,000,000	100,583,213	415,787	99,59	

Bahwa realisasi penyerapan Anggaran DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MARI Tahun 2024 berdasarkan tabel diatas adalah sebesar Rp 169,764,713,00 (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) dengan realisasi sebesar 98,31 % (sembilan puluh delapan koma tiga puluh satu) persen dengan sisa pagu sebesar Rp 2,915,287,00 (dua juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau 1,69 % (satu koma enam puluh sembilan) persen,

2, EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

IKPA merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK,05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran,

Pada prinsipnya, penilaian IKPA diberlakukan untuk kinerja pelaksanaan anggaran satu tahun anggaran penuh, Untuk Tahun 2024, IKPA tidak dilakukan reformulasi, namun terdapat perubahan ketentuan dan probis IKPA yang meliputi 8 indikator yaitu :indikator revisi DIPA, indikator revisi halaman III DIPA, indikator penyerapan anggaran, indikator belanja kontraktual, indikator penyelesaian tagihan, indikator pengelolaan UP dan TUP, indikator dispensasi SPM, dan indikator capaian output,

Pada tahun 2024, kantor Pengadilan Militer I-04 Palembang mendapatkan nilai IKPA secara keseluruhan sebesar 98.07, Nilai tersebut diperoleh dari penilaian 8 indikator yang telah dijelaskan diatas, Dari 8 indikator tersebut, kantor Pengadilan Militer I-04 Palembang mendapatkan nilai penuh 100 untuk 4 indikator seperti indikator revisi DIPA, Penyerapan Anggaran, indikator pengelolaan UP dan TUP, dan indikator capaian output, sedangkan 1 indikator lainnya seperti indikator deviasi halaman III DIPA memperoleh nilai 89.72. Selain untuk 2 indikator belanja kontraktual dan indikator Penyelesaian Tagihan yang juga tidak mendapatkan nilai maksimal disebabkan oleh tidak adanya belanja kontraktual. Masalah-masalah terkait dengan monitoring dan evaluasi terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran diharapkan tidak terjadi lagi sehingga nilai IKPA bagi kantor Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat maksimal.

BAB IV

PENUTUP

A, KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Militer I-04 Palembang merupakan tindak lanjut atau respons atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bertujuan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan rencana strategis,

LKjIP Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2020 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI secara garis besar, Dirjen Badilmiltun MARI, dan tentunya secara khusus Rencana Strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang, Indikator Kinerja Utama ditetapkan berdasarkan acuan dari Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaharuan Peradilan Indonesia 2010-2035, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dan dari laporan kinerja ini dapat disimpulkan bahwa:

- 1, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2024 ini secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, terdapat keberhasilan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tahun anggaran 2024, Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran,
- 2, Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), Namun demikian, masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran khususnya dalam peningkatan percepatan penyelesaian perkara, Sehingga akan mendapatkan hasil capaian yang optimal,

B, SARAN

- 1, Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen *control* yang obyektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-04 Palembang,

2, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Militer I-04 Palembang,


3, Menjadikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan fungsi *reward and punishment*,

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun Anggaran 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Satker Pengadilan Militer I-04 Palembang,

Palembang, 14 Februari 2025
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang,



Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto



LAMPIRAN



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG SESUAI PERMA 7 TAHUN 2015



KEPALA
FREDY FERDIAN ISNARTANTO, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP. 11010047011279



WAKIL KEPALA
SYAWALUDDINSYAH, S.H., M.H.
LETKOL CHK NRP. 1101002461171

POKIMMIL
BRIEFING KEJURUSAN S.H., S.P.
LETKOL CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171



PANITERA
ZULKOPLI, S.H., M.H.
MAYOR CHK NRP. 1106002741279



PANMUD PIDANA
GUNADI, S.H.
LETU CHK NRP 21010051510681

KEJURUSAN S.H., S.P.
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171



PANMUD HUKUM
ZULKARNAIN, S.H.
LETU CHK NRP. 21020026780383

KEJURUSAN S.H., S.P.
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171



KASUBBAG PERENCANAAN, IT & PELAPORAN
FEBRIANSYAH, S.H.
PENATA NIK. 189022320060410011

KEJURUSAN S.H., S.P.
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171



SEKRETARIS
SUPRIYADI, S.H., M.H.
MAYOR CHK NRP. 21930303390275



KASUBBAG KEPENGAWALAN & ORYENTAL
DEVI WAHYUNI, S.H., M.H.
PENATA NIK. 193505142006042006

KEJURUSAN S.H., S.P.
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171



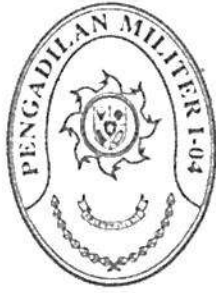
KASUBBAG UMUM & KECANGAN
AGUSTINA YANTI, S.H.
PENATA TK I NRP. 196708151899032002

KEJURUSAN S.H., S.P.
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171
KAPITAN CHK NRP. 1101002461171

PANITERA PENGGANTI
SEKRETARIS, S.H.
PENATA NIK. 1101002461171
PENATA NIK. 1101002461171
PENATA NIK. 1101002461171
PENATA NIK. 1101002461171
PENATA NIK. 1101002461171
PENATA NIK. 1101002461171
PENATA NIK. 1101002461171

FUNGSIONAL
WYANWARA, ALLEN, S.P.
PENATA NIK. 193505142006042006
PENATA NIK. 193505142006042006
PENATA NIK. 193505142006042006
PENATA NIK. 193505142006042006
PENATA NIK. 193505142006042006
PENATA NIK. 193505142006042006
PENATA NIK. 193505142006042006

PTSP



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA PENGADILAN
MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

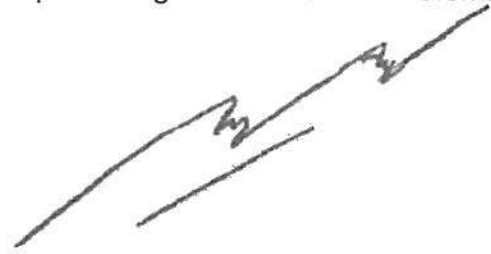
Jl. Gubernur H.Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring
Palembang Telp/Fax. (0711) 5620579
Website : dilmil.palembang.go.id Email:Palembang.dilmil04@gmail.go.id

CAPAIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN2024
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	85,7%	114,2%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	96%	95,7%	99,7%
		d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	92%	96%	104,3%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
4.	Terwujudnya pelayanan Kesekretariatan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, Teknologi Informasi dan statistik serta pemantauan evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, penataan Organisasi dan Tata Laksana	100%	100%	100%

		Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan	100%	99%	99%
--	--	--	------	-----	-----

Mengetahui,
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang



Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto,

**DAFTAR PEGAWAI YANG MENGIKUTI DIKLAT
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
TAHUN 2024**

No	NamaPangkat/Gol/NRP/NIP	Kegiatan	Penyeleng gara
JANUARI 2024 - NIHIL			
FEBRUARI 2024			
1.	Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 21960346860974	Kegiatan Bimtek Panitera / Panitera Pengganti Meningkatkan Kompetensi dan Integritas Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Militer TA 2024 secara daring.	Dirjen Badilmiltun MARI
2.	- Sudiyo, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 2920066651169 - Sugiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11120031710786	Kegiatan Bimtek Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu di Lingkungan Peradilan Militer secara Daring.	Dirjen Badilmiltun MARI
MARET 2024 - NIHIL			
APRIL 2024 - NIHIL			
MEI 2024			
1.	Gunadi, S.H. Lettu Chk NRP 21010051510681	Bimtek Panitera / Panitera Pengganti secara Daring / On-Line Meningkatkan Kompetensi dan Integritas Kepaniteraan di Peradilan Militer TA 2024	Dirjen Badilmiltun MARI
JUNI 2024			
1.	Sugiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11110028360286	Bimtek Kompetensi Hakim di Peradilan Militer TA 2024 dengan tema "Penyelesaian Perkara Koneksitasdi Lingkungan Peradilan Militer" Secara daring dan luring	Dirjen Badilmiltun MARI
2.	- Tobri Antony, S.H. Lattu Chk NRP 21000015161077	Kegiatan Bimtek Kepaniteraan Dilmiltama Tahun 2024, "Sosialisasi Aplikasi E-Berpadu dalam	Dilmiltama

3.	<p>- Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 21960346860974</p> <p>Dr. Putra Nova AS, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11100000741185</p>	<p>rangka Mewujudkan Digitalisasi Administrasi Perkara Pidana serta Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum” secara daring.</p> <p>Kegiatan Rapat Finalisasi Penyusunan Kurikulum Pimpinan Pengadilan, Panitera Pengadilan Peradilan Militer secara luring.</p>	<p>Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan MARI</p>
<p>JULI 2024 - NIHIL AGUSTUS 2024</p>			
1.	<p>Srilanjari, A. Md. ASN II/c NIP. 19930908202012012</p>	<p>Pelatihan Jarak Jauh (PPJ) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Secara Asynchronous dan Synchronous Secara luring</p>	<p>Pusdiklat Keuangan dan Perbendaharaan</p>
<p>SEPTEMBER 2024</p>			
1.	<p>- Fredy Ferdian I, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11010047011279</p> <p>- J.M. Siahaan, S.H., M.Hum. Letkol Chk NRP 2920087781171</p>	<p>Bimtek Kompetensi Hakim di Lingkungan Peradilan Militer dengan Tema “Bimbingan Teknis Penyusunan Perkara Restorative Justice”</p>	<p>Dirjen Badilmiltun MARI</p>
2.	<p>- Endah Wulandari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11070056110484</p>	<p>Kegiatan Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Implementasi Restorative Justice di Perdilan Militer</p>	<p>Dirjen Badilmiltun MARI</p>
3.	<p>Dr. Putra Nova AS, S.H., M.H. Mayor Chk</p>		

4.	NRP 1110000741185 Syawaluddinsyah, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11010002461171	Kegiatan Sosialisasi Keputusan Bersama Ketua MARI dan Panglima TNI Nomor Kep/ 64/I/2022 dan Nomor 25/KMA/ SKB/I/2022	Dirjen Badilmiltun MARI
	- Zulkopli, S.H., M.H. Mayor Chk 11060002741279 - Gunadi, S.H. Lettu Chk 21060002741279	Bimtek Kepaniteraan Dilmiltama Tahun 2024 dengan tema "Penyelarasan dan Harmonisasi Perjanjian Kerjasama Aplikasi e-Berpadu dalam Rangka Digitalisasi Administrasi Perkara Pidana menuju Terwujudnya Pengadilan yang Tangguh"	Dirjen Badilmiltun MARI
OKTOBER 2024			
1.	Mona Anggreyne, S.I.P., M.A.P Penata Muda Tk. I/IIIb/b NIP 199405162019032009	Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Kepegawaian Angkatan I Tahun 2024 secara online	Pusdiklat Manajemen Kepemimpinan MARI
NOVEMBER 2024			
1.	Endah Wulandari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11070056110484	Kegiatan <i>Regional Conference on "Achieving Just Societies Justice Pathways for People and Planet In Asia and the Pasific"</i> .	Sekretaris MARI
	- Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11010047011279 - J.M Siahaan, S.H., M.Hum. Letkol Chk NRP 2920087781171 - Dr. Putra Nova AS. S.H., M.H. Mayor Chk NRP 1100007401185 - Sugiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11120031710786 - Afini Perdana, S.ST.Han., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11120029910290	Kegiatan Bimtek Hakim Militer TA 2024	Dirbinganmil MARI

3.	<p>Desly Farghani, S.H.</p> <p>PPNPN</p> <p>Syawaluddinsyah, S.H., M.H.</p> <p>Letnan Kolonel Chk</p> <p>NRP 11010002461171</p>	<p>Kegiatan Bimtek Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Peradilan Militer secara <i>Daring</i></p> <p>Pelatihan Singkat Terkait Paradigma Pembaruan Hukum Pidana bagi Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding Peradilan Militer seluruh Indonesia</p>	<p>Dirjen Bdiilmiltun MARI</p> <p>Pusdik</p>
<p>DESEMBER 2024 - NIHIL</p>			



KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NOMOR 77 /KPM.W1-Mil04/SK.KP3.4.1/I/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; dan
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
 2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang tanggal, 13 September 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG.**

- KESATU** :
- Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

- KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Militer I-04 Palembang agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang.
Pada tanggal 8 Januari 2024



KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,

FREDY FERDIAN ISNARTANTO
LETNAN KOLONEL CHK

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang
 Nomor : 77 /KPM.WI-MII04/SK.KP3.4.1/1/2024
 Tanggal : 8 Januari 2024

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah waktu perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA nomor 2 Tahun 2014 pada Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Perkara = Pidana/Kejahatan dan Pelanggaran Lalu Lintas. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum Banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$</p>	Panitera	Laporan Bulanan

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama. 		<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi interval IKM index harus > 80. • Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan. 	<p>Panitera dan Sekretaris</p>	<p>Laporan Semester, Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama. 	<p>d. Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan</p>	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi interval IKM index harus > 80. • Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan. 	<p>Panitera dan Sekretaris</p>	<p>Laporan Semester, Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
<p>2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim ke Papera, Odmlil, PM (Penyidik Pom) dan Anikum sesuai dengan ketentuan. • Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Papera: Perwira Penyerah Perkara. 	<p>Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu.</p>	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim ke Papera, Odmlil, PM (Penyidik Pom) dan Anikum sesuai dengan ketentuan. • Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Papera: Perwira Penyerah Perkara. 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

9

9

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Odmitil : Oditur Militer. • PM : Polisi Militer. • Ankum : Atasan Yang Berhak Menghukum. 		
		<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan / Jumlah Perkara yang diajukan direvisikan di luar gedung pengadilan x 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara. • Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (direvisikan). 		panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

PENGADILAN KERALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,



FREDY FERDIAN ISNARTANTO
 EFTYAN KOLONEL CHK

Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Militer I-04 Palembang
- Visi : Terwujudnya Pengadilan Militer I-04 Palembang yang Agung Misi
- Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-04 Palembang
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas Pengadilan Militer I-04 Palembang
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-04 Palembang

NO	TUJUAN		TARGET	SASARAN		TARGET				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	90%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92%	94%	96%	98%	100%
					Persentase perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding	89%	90%	93%	75%	75%
					Persentase perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	89%	90%	93%	96%	96%
					Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	89%	90%	91%	92%	92%

2.	Tercapainya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Minutasi yang tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%
3	Terwujudnya pelayananakses peradilan bagi masyarakatmiskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi miskin masyarakat dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Pangkat/NRP : Letnan Kolonel Chk/11010047011279
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Pangkat/NRP : Laksamana Pertama TNI
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan

Selaku atasan langsung dari pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan

Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Pihak Pertama,
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu. b. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding. c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi. d. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan. 	<p>100%</p> <p>75%</p> <p>96%</p> <p>92%</p>
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirimkan ke para pihak tepat waktu.	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
4.	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. b. Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana. c. Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan. 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>99%</p>

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Rp. 4.219.945.000,-
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp. 172.680.000,-
	<u>Rp. 4.392.625.000,-</u>

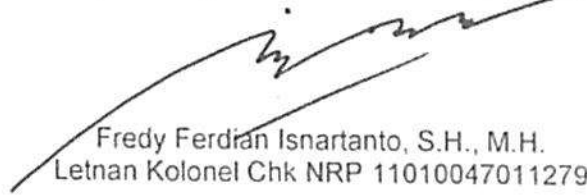
Palembang, 11 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan



Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Pihak Pertama,
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang



Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Pangkat/NRP : Kolonel Chk/11010047011279
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Pangkat/NRP : Laksamana Pertama TNI
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan

Selaku atasan langsung dari pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan



Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Pihak Pertama,
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang



Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11010047011279

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu. b. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding. c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi. d. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.	100% 75% 96% 92%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirimkan ke para pihak tepat waktu.	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
4.	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	a. Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. b. Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana. c. Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.	100% 100% 99%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Rp. 5.357.256.000,-
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp. 276.470.000,-
	<u>Rp. 5.633.726.000,-</u>

Palembang, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan



Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Pihak Pertama,
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11010047011279



KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NOMOR 99 /KPM.W1-Mil04/SK.OT1.6/II/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan;
 - b. Bahwa agar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dapat menggambarkan kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan SAKIP; dan
 - c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009;
 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Kesekretariatan Mahkamah Agung RI;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3112/SEK/OT 01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP; dan

10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : SP DIPA-005.01.2/663211/2024 tanggal 24 November 2023 Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG.
- Pertama : Menunjuk nama-nama Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan.
- Kedua : Segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Militer I-04 Palembang dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang.

Pada tanggal Februari 2024



KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,

FREDY FERDIAN ISNARTANTO
LEPTAN KOLONEL CHK

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris MARI;
2. Ka Bua MARI;
3. Dirjen Badimiltun MARI;
4. Kadilmiltama;
5. Kadilmilti I Medan.

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Nomor : 97/KPM.W1-Mil04/SK.OT1.6/II/2024

Tanggal : 29 Februari 2024

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG**

NO	NAMA/PANGKAT/NRP/NIP	JABATAN	DALAM TIM
1.	Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11010047011279	Kepala	Penanggung jawab
2.	Syawaluddinsyah, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11010002461171	Wakil Kepala	Ketua
3.	Arif Dwi Prasetyo, S.H. Mayor Chk NRP 11080119231286	Pokkimmil	Koordinator
4.	Dr. Putra Nova Aryanto S., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11100007401185	Pokkimmil	Wakil Koordinator
5.	Zulkopli, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060002741279	Panitera	Penanggung jawab bidang Kepaniteraan
6.	Supriyadi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21950303390275	Sekretaris	Penanggung jawab bidang Kesekretariatan
7.	Tobri Antony, S.H. Lettu Chk NRP 21000015161077	Panitera Muda Hukum	Pelaksana bidang Kepaniteraan
8.	Gunadi, S.H Lettu Chk NRP 21010051510681	Panitera Muda Pidana	Pelaksana bidang Kepaniteraan
9.	Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 21960346860974	Panitera Pengganti	Pelaksana bidang Kepaniteraan
10.	Agustina Yanti, S.H. Penata Tk I NIP 196708151989032002	Kasubbag Umum dan Keuangan	Pelaksana bidang Umum dan Keuangan
11.	Febriansyah, S.H. Penata NIP 198002232006041001	Kasubbag PTIP	Pelaksana bidang PTIP
12.	Devi Wahyuni, S.H., M.H. Penata NIP 198509142009042006	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Pelaksana bidang Kepegawaian dan Ortala
13.	Alexander S. Sihotang, S.E. Penata Muda NIP 199209072020121004	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Operator
14.	Sugeng Riadi, S.E. PPNPN	Staf PTIP	Operator



KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,

FREDY FERDIAN ISNARTANTO
LETNAN KOLONEL CHK



KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NOMOR 105/KPM.W1-Mil04/SK.KP3.4.3/II/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2024 PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2023 Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusun Indikator Kinerja Utama; dan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024 PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2024 Pengadilan Militer I-04 Palembang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang.

KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang.

Pada tanggal Februari 2024



KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,

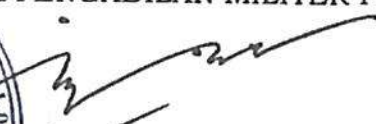

FREDY PERDIAN ISNARTANTO
LETNAN KOLONEL CHK

LAMPIRAN I

Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang
Nomor : /KPM.W1-Mil04/SK.KP3.4.3/II/2024
Tanggal : Februari 2024

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Letkol Chk Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H
2	Koordinasi Validasi Data	Letkol Chk Syawaluddinsyah, S.H., M.H.
3	Ketua	Mayor Chk Zulkopli, S.H., M.H.
4	Sekretaris	Mayor Chk Supriyadi, S.H., M.H.
5	Anggota	1. Lettu Chk Tobri Antony, S.H. 2. Lettu Chk Gunadi, S.H. 3. ASN Agustina Yanti, S.H. 4. ASN Febriansyah, S.H. 5. ASN Devi Wayhuni, S.H., M.H. 6. ASN Alexander Sepriyanto Sihotang, S.E 7. PPNPN Sugeng Riyadi, S.E
6	Tim Reviu Laporan Kinerja	1. Letkol Chk J.M. Siahaan, S.H., M.H. 2. Mayor Chk (K) Endah Wulandari, S.H., M.H. 3. Mayor Chk Arif Dwi Prasetyo, S.H. 4. Mayor Chk Dr. Putra Nova Aryanto S. S.H., M.H. 5. Kapten Chk Sugiarto, S.H. 6. Kapten Chk Afini Perdana, S.ST.Han., S.T., S.H., M.H.

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,


FREDY FERDIAN ISNARTANTO
LETNAN KOLONEL CHK



**MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT BADAN JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang 30257
Telp/Fax. (0711) 5620579
Website : dilimil.palembang.go.id
Email : palembang.dilimil04@gmail.com

**REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA
DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2024
PADA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

NO	AKUN	ANGGARAN	REALISASI		SISA DANA	
			Rp	%	Rp	%
1	Belanja Pegawai	3.287.219.000	3.240.319.363	98,57	45.899.537	1,43
2	Belanja Barang	1.519.946.000	1.514.832.112	99,55	5.113.888	0,34
3	Belanja Modal	17.982.000	17.960.000	99,88	22.000	0,12
	Jumlah	4.825.147.000	4.773.111.475	98,92	52.035.525	1,08

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran,

Supriyadi
Mayor Chk

Palembang, Januari 2025
Kasubbag Umum dan keuangan,

Agustina Yanti
Penata Tingkat I

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024
BULAN : DESEMBER

SATKER/KODE SATKER : PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG/663211
PROPINSI : SUMATERA SELATAN
BAGIAN ANGGARAN : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO. DIPA : SP DIPA-005.01.2.663211/2024

NO	KODE	KERJA/PROGRAM/KEG/SUB KEG/KODE.MATA.ANGGARAN	JENIS BELANJAMAK	PAGU DIPA		REALISASI SID BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI	
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%		
		663211	Pengadilan Militer I-04 Palembang										
	005.01.01		Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis										
	1066		Pembinaan Administrasi & Pengelolaan Keuangan BUA										
	001		Pembayaran Gaji & Tunjangan										
	51		Jumlah Kelompok Belanja 51 (Belanja Pegawai)										
	511111		Bel. Gaji Pokok PNS	680.748.000	93,12	46.798.000	6,87	680.737.400	100,00	10.600	0,00		
	511119		Bel. Pembulatan Gaji PNS	15.000	0,00	888	5,99	11.821	78,81	3.179	21,19		
	511121		Bel. Tunj. Suami/istri PNS	64.080.000	83,01	4.423.180	6,90	64.002.340	99,91	57.860	0,09		
	511122		Bel. Tunj. Anak PNS	18.355.000	93,10	1.175.588	6,40	18.263.820	99,50	91.380	0,50		
	511123		Bel. Tunj. Struktural PNS	25.350.000	99,32	2.180.000	0,87	25.200.000	99,41	150.000	0,59		
	511124		Bel. Tunj. Fungsional PNS	327.270.000	93,43	78.228	0,19	327.240.000	99,99	30.000	0,01		
	511125		Bel. Tunj. PPh PNS	41.580.000	86,98	2.989.220	7,21	38.907.483	93,62	2.852.537	6,38		
	511126		Bel. Tunj. Beras PNS	47.800.000	87,73	8.652.000	7,61	44.538.300	93,18	3.261.700	6,82		
	511129		Bel. Tunj. Umum PNS	113.721.000	92,44	1.280.000	1,11	108.419.000	95,34	5.302.000	4,68		
	511223		Bel. Tunj. Struktural TNIU/POLRI	18.000.000	88,49	1.280.000	1,43	17.920.000	99,56	80.000	0,44		
	511224		Bel. Tunj. Fungsional TNIU/POLRI	88.080.000	88,00	1.494.454.194	11,29	87.990.260	99,92	69.740	0,08		
	511225		Bel. Tunj. PPh TNIU/POLRI	1.688.200.000	81,49	7.129.733	4,35	1.686.254.194	99,30	11.945.806	0,70		
			JML KELOMPOK BELANJA PEGAWAI	3.287.219.000	90,38	289.364.845	8,19	3.240.319.363	98,57	23.245.035	14,17		

NO	KODE	KERJA/PROGRAM/KEG/SUB KEG/KODE.MATA.ANGGARAN	JENIS BELANJAMAK	PAGU DIPA		REALISASI SID BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI	
				TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%		
		663211	Pengadilan Militer I-04 Palembang										
	005.01.01		Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis										
	1066		Pembinaan Administrasi & Pengelolaan Keuangan BUA										
	002		Penyenggaraan Operasional & Pemeliharaan Perkantoran										
	52		Jumlah Kelompok Belanja 52 (Belanja Barang)										
	521111		Bel. Keperluan Perkantoran (Jasa Salpam CS)	509.249.000	84,82	78.348.000	15,38	509.249.000	100,00	0	0,00		
	521111		Bel. Keperluan Perkantoran (Langganan Koran/Majalah)	3.800.000	83,33	800.000	16,87	3.800.000	100,00	0	0,00		
	521111		Bel. Keperluan Perkantoran (Langganan Air Minum/Galon)	6.900.000	65,81	2.350.000	34,08	6.890.800	99,87	9.200	0,13		
	521111		Bel. Keperluan Perkantoran (Retribusi Sampah)	2.400.000	91,87	200.000	8,33	2.400.000	100,00	0	0,00		
	521111		Bel. Keperluan Kantor Lainnya	23.628.000	99,53	110.000	0,47	23.627.893	100,00	1.107	0,00		
	521811		Bel. Barang Persediaan Barang Konsumsi (Keperluan sehari-hari perkantoran)	44.772.000	97,31	1.202.438	2,89	44.769.175	99,99	2.825	0,01		
	521111		Bel. Keperluan Perkantoran (Langganan Internet)	198.000.000	100,00	0	0,00	198.000.000	100,00	0	0,00		

521111	Bel. Keperluan Perkantoran (Lisensi Video Conference)	8.000.000	100,00	0	0,00	8.000.000	100,00	0	0,00	8.000.000	100,00	0	0,00
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7.000.000	87,92	588.000	8,11	6.154.410	87,92	588.000	8,11	6.154.410	87,92	588.000	8,11
522112	Bel. Langganan Telepon	5.640.000	97,58	0	0,00	5.502.445	97,58	0	0,00	5.502.445	97,58	0	0,00
522113	Bel. Langganan Air	14.400.000	99,98	0	0,00	14.393.568	99,98	0	0,00	14.393.568	99,98	0	0,00
522141	Bel. Sewa Web Hosting	3.500.000	100,00	0	0,00	3.500.000	100,00	0	0,00	3.500.000	100,00	0	0,00
523111	Bel. Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan	180.520.000	91,83	14.709.000	8,15	185.768.468	91,83	14.709.000	8,15	180.475.468	99,98	44.532	0,02
523111	Bel. Biaya Tambahan Pemeliharaan Gedung & Bangunan	50.000.000	47,41	26.290.000	52,58	24.992.472	47,41	26.290.000	52,58	49.995.000	99,99	5.000	0,01
523121	Bel. Biaya Pemeliharaan Halaman	27.000.000	92,58	2.000.000	7,41	24.992.472	92,58	2.000.000	7,41	26.992.472	99,97	7.528	0,03
523121	Bel. Biaya Pemeliharaan Peralatan & Mesin (Kendaraan Roda 4)	99.000.000	82,84	16.487.863	17,15	79.529.065	82,84	16.487.863	17,15	95.998.928	100,00	3.072	0,00
523121	Bel. Biaya Pemeliharaan Peralatan & Mesin (Kendaraan Roda 2)	20.000.000	88,59	2.279.129	11,40	17.717.362	88,59	2.279.129	11,40	19.998.491	99,98	3.509	0,02
523121	Bel. Biaya Pemeliharaan Peralatan & Mesin (AC)	18.840.000	88,68	2.210.000	13,28	14.420.000	88,68	2.210.000	13,28	16.630.000	99,94	10.000	0,08
523121	Bel. Biaya Pemeliharaan Peralatan & Mesin (Genset)	3.500.000	45,14	1.900.000	54,29	1.580.000	45,14	1.900.000	54,29	3.480.000	99,43	20.000	0,57
523121	Bel. Biaya Pemeliharaan Peralatan & Mesin (Bahan Bakar Genset)	5.042.000	83,29	4.199.310	16,70	4.199.310	83,29	4.199.310	16,70	5.041.310	99,99	690	0,01
523121	Bel. Biaya Pemeliharaan Peralatan & Mesin (Printer)	4.400.000	64,68	2.845.000	32,05	2.845.000	64,68	1.410.000	32,05	4.255.000	96,70	145.000	3,30
523121	Bel. Biaya Pemeliharaan Peralatan & Mesin (Komputer)	15.180.000	93,12	1.044.974	6,88	14.135.026	93,12	1.044.974	6,88	15.180.000	100,00	0	0,00
523121	Bel. Biaya Pemeliharaan Peralatan & Mesin (Laptop)	14.490.000	81,38	2.917.500	19,08	11.792.000	81,38	2.917.500	19,08	14.409.500	98,44	80.500	0,58
523121	Bel. Biaya Pemeliharaan Peralatan & Mesin (Mesin Fotokopi)	8.860.000	79,59	6.892.746	17,82	6.892.746	79,59	1.528.138	17,82	8.418.884	97,22	241.116	2,78
523121	Bel. Biaya Pemeliharaan Peralatan & Mesin (Inventaris Kantor Lainnya)	8.500.000	72,48	4.709.966	27,54	1.790.034	72,48	1.790.034	27,54	8.500.000	100,00	0	0,00
521115	Bel. Honor Operasional Saiker	34.944.000	83,33	29.120.000	19,67	34.944.000	83,33	5.824.000	19,67	34.944.000	100,00	0	0,00
521119	Bel. Barang Operasional Lainnya (Pakaian Dinas)	34.200.000	100,00	0	0,00	34.200.000	100,00	0	0,00	34.200.000	100,00	0	0,00
522141	Bel. Barang Sewa Rumah Dinas Hakim	120.960.000	90,83	109.820.000	8,33	109.820.000	90,83	10.080.000	8,33	119.700.000	98,96	1.260.000	1,04
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Tiket)	2.100.000	0,00	2.100.000	100,00	0	0,00	2.100.000	100,00	2.100.000	100,00	0	0,00
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Penginapan)	20.400.000	64,50	13.158.270	28,97	7.540.400	64,50	5.909.400	28,97	19.067.870	93,47	1.332.330	6,53
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Uang Harian)	12.000.000	62,84	7.540.400	35,83	4.300.000	62,84	4.300.000	35,83	11.840.400	98,87	159.600	1,33
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Transport Rili)	15.680.000	70,83	11.060.000	29,31	4.580.000	70,83	4.580.000	29,31	15.650.000	99,94	10.000	0,08
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.680.000	67,04	2.453.700	0,00	2.453.700	67,04	0	0,00	2.453.700	67,04	1.206.300	32,98
	JML KELOMPOK BELANJA BARANG	1.519.948.000	87,04	1.322.965.638	20,00	600.000	87,04	191.868.474	12,62	1.514.832.112	99,68	5.113.888	0,34
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen												
1071	Layanan Sarana dan Prasarana Internal												
052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi												
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin												
	Pengadaan Printer	4.218.000	99,57	4.200.000	0,00	4.200.000	99,57	0	0,00	4.200.000	99,57	18.000	0,43
	Pengadaan Scanner	13.784.000	99,97	13.760.000	0,00	13.760.000	99,97	0	0,00	13.760.000	99,97	4.000	0,03
	JML KELOMPOK BELANJA MODAL	17.982.000	99,88	17.960.000	0,00	17.960.000	99,88	0	0,00	17.960.000	99,88	22.000	0,12
	JML KELOMPOK BELANJA SELURUHNYA	4.625.147.000	89,36	4.311.880.156	9,56	461.231.319	89,36	461.231.319	9,56	4.773.111.475	99,92	52.035.525	1,08

Palembang, 2 Januari 2025

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Muhammad Nasir, S.H.
NIP. 198205132006041004



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT BADAN JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang 30257
Telp/Fax. (0711) 5620579
Website : dilmil.palembang.go.id
Email : palembang.dilmil04@gmail.com

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA
DIPA (05) DITJEN BADILMILTUN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2024
PADA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NO	AKUN	ANGGARAN	REALISASI		SISA DANA	
			Rp	%	Rp	%
1	Belanja Pegawai	172.680.000	169.764.710	98,83	2.915.287	1,59
	Jumlah	172.680.000	169.764.710	98,83	2.915.287	1,59

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran,

Supriyadi
Mayor Chk

Palembang, Januari 2024

Kasubbag Umum dan keuangan,

Agustina Yanti
Penata Tingkat I

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024
BULAN : DESEMBER

SATKER/KODE SATKER : PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG/663212
PROPINSI : SUMATERA SELATAN
BAGIAN ANGGARAN : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
NO. DIPA : SP DIPA-005.05.2.663212/2024

NO	KERJA/PROGRAM/KEG/SUB KEG/KODE MATA ANGGARAN	KODE SAKUR	JENIS BELANJA/MAK	PAGU DIPA	REALISASI S/D BULAN LALU		REALISASI BULAN INI		REALISASI S/D BULAN INI		SISA DANA S/D BULAN INI	
					TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%
	663212		Pengadilan Militer I-04 Palembang									
	005.05.BF		Program Penegakan dan Pelayanan Hukum									
	1058		Peningkatan Manajemen Peradilan Militer									
	1056.BCA.U12		Perkara Pidana yang Diselesaikan Pada Tingkat Pertama Di Wilayah Dilmil I-04 Palembang									
	051		Pendaftaran Berkas Perkara									
	521211		Belanja Bahan (Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara)	7.200.000	84,72	1.100.000	15,28	7.200.000	100,00	0	0,00	0,00
	521811		Belanja Bahan Untuk Persediaan Barang Konsumsi (ATK Perkara)	18.480.000	93,07	1.280.000	6,93	18.480.000	100,00	0	0,00	0,00
	052		Penetapan Hari Sidang									
	521114		Pengiriman Penetapan Hari Sidang	3.000.000	55,97	544.000	18,13	2.223.000	74,10	777.000	25,90	
	053		Pemeriksaan di Sidang Pengadilan									
	521211		Belanja Bahan (Konsumsi Makan Sidang Pengamanan)	5.000.000	85,04	738.000	14,76	4.990.000	99,80	10.000	0,20	
	521211		Belanja Bahan (Konsumsi Makan Sidang Terdakwa)	7.500.000	99,87	0	0,00	7.490.000	99,87	10.000	0,13	
	521211		Belanja Bahan (Konsumsi Makan Sidang Di Luar Jam Kerja)	8.000.000	95,29	368.000	4,60	7.991.000	99,89	9.000	0,11	
	522151		Belanja Jasa Profesi (Honor Sakel Ahli)	3.100.000	96,77	0	0,00	3.000.000	96,77	100.000	3,23	
	524113		Perjalanan Dinas Dalam Kota (Pemeriksaan Barang Bukti di Luar Ruang Sidang)	3.600.000	75,00	0	0,00	2.700.000	75,00	900.000	25,00	
	054		Minutas/Upaya Hukum									
	521211		Belanja Bahan (Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara)	2.400.000	71,04	675.000	28,13	2.380.000	99,17	20.000	0,83	
	055		Pengiriman Dokumen Penyelesaian Perkara									
	521114		Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (Pengiriman Dokumen Penyelesaian Perkara)	12.000.000	90,54	1.074.000	8,95	11.938.500	99,49	61.500	0,51	



**MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang
Telp/Fax. (0711) 5620579
Website : dilmil.palembang.go.id
Email : Palembang.dilmil04@gmail.com

Nomor : *70.A/SEKPM W.1Mil04/RA.1.8/1/2025*
Lampiran : -
Klasifikasi : Biasa
Perihal : Undangan Rapat Penyusunan SAKIP
dan LKJIP

Palembang, *17* Januari 2025

Kepada
Yth. Anggota SAKIP Dilmil I-04 Palembang
di
Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan akan diadakannya Rapat Penyusunan SAKIP dan LKJIP, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu dalam acara tersebut yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 20 Januari 2025
Jam : 14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Teleconference Dilmil I-04 Palembang

Mengingat sangat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat waktu. Atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang
Waka
U.b.
Sekretaris,


Supriyadi
Mayor Chk



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang
Telp/Fax. (0711) 5620579
Website : dilmil.palembang.go.id
Email : Palembang.dilmil04@gmail.com

NOTULEN
RAPAT PENYUSUNAN SAKIP 2025
DAN PENYUSUNAN LKjIP TAHUN 2024
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

Tempat : Teleconference Dilmil I-04 Palembang
Hari/Tanggal : Senin, 20 Januari 2025
Waktu : 10.00 WIB s.d. Selesai
Peserta : Terlampir dalam Absen

No	Pembicara	Materi/ Pengarahan/ Pertanyaan	Uraian/Tangapan
1.	Wakadilmil	Pembukaan	<p>Wakadilmil mengucapkan salam kepada peserta rapat, dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran peserta pada acara rapat.</p> <p>Wakadilmil menyampaikan perihal penyampaian dan pembuatan Dokumen SAKIP yang harus disampaikan pada Februari 2024 ini. Penyampaian ini didasarkan pada surat Kepala Pengadilan Militer I Medan No. 120/KPMT.W1-Mil/R.A.16/I/2025 tentang Permintaan Dokumen SAKIP pada tanggal 8 Januari 2025.</p> <p>Wakadilmil memberikan kesempatan kepada Sekretaris untuk menyampaikan informasi dan materi dalam penyusunan SAKIP tahun 2025 dan penyusunan LKjIP Tahun 2024.</p>
2.	Sekretaris	Penyampaian Materi	<p>Sekretaris menyampaikan bahwa SAKIP yang akan disusun ini terdiri dari dokumen Reviu Indikantor Kinerja Utama (IKU), dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2026, dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dokumen Rencana Aksi Kinerja tahun 2025, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024.</p> <p>Sekretaris meminta saran dan dokumen-dokumen tersebut kepada seluruh peserta rapat.</p>

3.	Wakadilmil.	Himbauan	<p>Wakadilmil mengingatkan agar selalu memperhatikan tanda baca dalam penyusunan terlebih untuk tahun yang sesuai walaupun dalam pelaksanaannya konsep tersebut sudah ada sebelumnya.</p> <p>Data-data dalam penyusunan laporan ini harus di compare/ disamakan dengan keadaan riil pada saat ini dan harus dilihat juga capaian dari setiap indikator-indikator penilaiannya, supaya setiap laporan memiliki capaian indikator yang sama dan tidak berbeda.</p> <p>Untuk penyusunan IKU, harus mengikuti IKU yang terbaru jika tidak ada perubahan maka mengikuti IKU yang sudah ada sebelumnya</p> <p>Untuk PKT sudah dilaksanakan pada awal tahun ini maka dari itu bisa langsung dimasukkan kedalam lampiran pada Renstra, RAK, dan bisa juga untuk RKT tahun 2025 mengingat belum ada perubahan dari IKU yang ada sebelumnya</p>
4.	Panitera	Penyampaian informasi	<p>Dari unsur kepaniteraan sudah mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan saat ini. Laporan-laporan tersebut sudah disiapkan sebagaimana biasanya dibuat untuk laporan bulanan, triwulan, semester, ataupun tahunan.</p> <p>Laporan-laporan bulanan, triwulan, semester, ataupun tahunan yang telah dibuat dapat diminta <i>soft copy</i>-nya dan sudah disiapkan sesuai dengan bahan yang akan dipakai dalam isi laporan-laporan tersebut.</p>
5.	Sekretaris	Penyampaian informasi	<p>Isi dari laporan-laporan tersebut juga berkenaan dengan kesekretariatan seperti bagian keuangan tentang capaian realiasi anggaran selama tahun 2024, bagian kepegawaian seperti jumlah anggota yang ada dan beberapa proses mutasi selama tahun 2024 boleh dimasukkan dalam laporan tersebut.</p>
6	Kasubbag PTIP	Penyampaian Informasi	<p>Isi dari laporan seperti LKJiP secara garis besar mengikuti isi dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2024 yang juga menjadi patokan dalam pembuatan Perjanjian Kinerja tahun 2024 dengan melihat perbandingan capaian kinerja dengan target capaian yang ada dalam Renstra 2020-2024.</p>

7	Kasubbag PTIP	Penyampaian Informasi	<p>Beberapa indikator tersebut meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 3. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 4. Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan 5. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu. 6. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. <p>Kemudian dalam proses penyusunan ini juga dibutuhkan analisis tentang pencapaian yang dari setiap indikator-indikator tersebut.</p>
8.	Panitera	Penyampaian Informasi	<p>Dari ke 6 indikator tersebut teradapat 5 indikator yang berkenaan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara. Dalam hal ini kepaniteraan akan memberikan informasi sebagaimana yang ada pada kondisi saat ini sesuai dengan indikator-indikator tersebut serta capaian dari setiap indikator</p> <p>Sedangkan untuk pelaksanaan Indikator Index Persepsi Kepuasan Masyarakat dapat di lakukan informasi pelaksanaannya oleh bagian kesekretariatan.</p>
9.	Sekretaris	Penyampaian informasi	<p>Terkait Indikator Index Persepsi kepuasan Masyarakat yang puas terhadap pelayanan pengadilan telah dilakukan selama ini dengan baik dengan jumlah minimal jumlah survei sebanyak 30 orang, dan dalam pelaksanaan survei petugas tidak diperbolehkan memberikan arahan nilai kecuali arahan cara pengisian.</p> <p>Hasil survei tersebut di lakukan rekapitulasi selama 3 bulan sekali/ pertriwulan dan pengisian dalam LKJIP pada indikator IKM adalah hasil rekapitulasi dari setahun pada tahun 2024.</p>
10.	Wakadilmil	Himbauan	<p>Wakadilmil I-04 Palembang menghimbau untuk selalu semangat dan bekerjasama dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Renstra dalam lima tahun ke depan.</p> <p>Kadilmil mengingatkan agar dalam proses penyusunan diperhatikan pada pedoman penyusunan laporan sesuai dengan peraturan/ surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.</p>

11.	Wakadilmil	Penutup	Wakadilmil menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang atas peran serta dan partisipasi selama ini "Bersama Kita Bisa"
-----	------------	---------	--

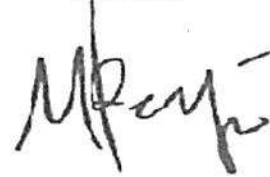
Palembang, 20 Januari 2025

Sekretaris



Supriyadi, S.H., M.H.
Mayor Chk

Notulen



Mona Anggreyni, S.I.P.
Penata Muda TK. I

Mengetahui,
Wakil Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang



Syawaluddinsyah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang
Telp/Fax. (0711) 5620579
Website : dilmil.palembang.go.id
Email : Palembang.dilmil04@gmail.com

DAFTAR HADIR
RAPAT PENYUSUNAN SAKIP DAN LKjIP
PADA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

Hari : Senin Tanggal : 20 Januari 2025

No	Nama/Pangkat/NRP/NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Syawaluddinsyah, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11010002461171	Kadilmil I-04 Palembang	
4.	Zulkofli, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.11060002741279	Panitera	
5.	Supriyadi, SH.MH. Mayor Chk NRP21950303390275	Sekretaris	
6.	Agustina Yanti, S.H. III/d NIP 196708151989032002	Kasubbag Umum dan Keuangan	
7.	Febriansyah, S.H. ASN NIP. 198002232006041001	Kasubbag Perencanaan IT dan Pelaporan	
8.	Devi Wahyuni, S.H.MH. III/c NIP. 198509142009042006	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	
9.	Alexander Sepriyanto Sihotang, S.E. III/b NIP. 199209072020121004	Staff PTIP	

Palembang, 20 Januari 2025
Sekretaris



Supriyadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 21950303390275



**MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang
Telp/Fax. (0711) 5620579
Website : dilmil.palembang.go.id
Email : Palembang.dilmil04@gmail.com

DOKUMENTASI RAPAT PENYUSUNAN SAKIP DAN LKjIP



FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

No	Pernyataan	Check List	
1.	Format	1. Laporan Kinerja telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah	√
		2. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2.	Mekanisme penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan kinerja	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan kinerja telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam Laporan kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	√
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam Laporan kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	√
		2. Tujuan/sasaran dalam Laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Tujuan/sasaran dalam Laporan kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam Laporan kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan Indikator Kinerja telah cukup mengukur tujuan/ sasaran	√
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		10. IKU dan Indikator Kinerja telah SMART	√



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang
Telp/Fax. (0711) 5620579
Website : dilmil.palembang.go.id
Email : Palembang.dilmil04@gmail.com

NOTULEN
RAPAT REVIU LKjIP TAHUN 2024
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

Tempat : Teleconference Dilmil I-04 Palembang
Hari/Tanggal : Senin, 23 Januari 2025
Waktu : 10.00 WIB s.d. Selesai
Peserta : Terlampir dalam Absen

No	Pembicara	Materi/ Pengarahan/ Pertanyaan	Uraian/Tangapan
1.	Pereviu I	Pembukaan	Hari ini kita hadir disini untuk melakukan Reviu LKjIP tahun 2024 yang akan dikirimkan pada bulan ini. Hasil LKjIP sudah selesai dikerjakan dan harus dilihat kesesuaiannya dengan format yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung RI. Saat ini 2 pereviu telah pindah tugas maka dilakukan oleh pereviu yang masih bertugas
2.	Pereviu II	Pembahasan	Bila di lihat dari tahun lalu kelengkapan dokumentasi juga sudah baik dan sudah sesuai dengan yang perlu di laporkan.
3.	Pereviu II	Masukkan	Mungkin untuk warna pembuatan isi LKjIP bisa dilakukan upgrade dan sesuaikan dengan tema pada cover didepan atau cover depan yang mengikuti tema yang ada didalamnya sehingga terjadi sinkronisasi tampilan warna didalam laporan maupun cover.
4.	Pereviu I	Penyampaian informasi	Untuk isinya sebelum dalam bentuk laporan, isi telah diilkukan pemeriksaan dan pengisian secara berjenjang dari kesekretariatan, kepaniteraan, dan diakhiri oleh Wakadilmil.
5.	Pereviu I	Penutup	Isi dari laporan-laporan tersebut juga berkenaan dengan kesekretariatan seperti bagian keuangan tentang capaian realiasi anggaran selama tahun 2024, bagian kepegawaian seperti jumlah anggota yang ada dan beberapa proses mutasi selama tahun 2024 boleh dimasukkan dalam laporan tersebut.

Pereviu I

Endah Wulandari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K)

Pereviu II

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
DILMIL I-04 PALEMBANG**

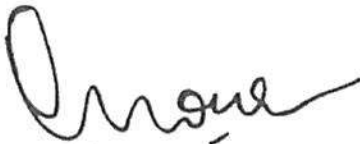
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Urusan Administrasi untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Urusan Administrasi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

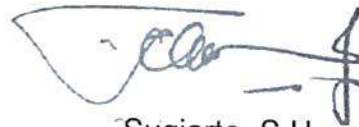
Palembang, 17 Februari 2024

Pereviu I



Endah Wulandari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K)

Pereviu II



Sugiarto, S.H.
Kapten Chk



**MAKHAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang
Telp/Fax. (0711) 5620579
Website : dilmil.palembang.go.id
Email : Palembang.dilmil04@gmail.com

DOKUMENTASI RAPAT REVIU LKJIP TAHUN 2024





Jl. H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Palembang

Telp/Fax. (0711) - 5620579

Email : PALEMBANG.DILMILI-04@gmail.com

Website : www.dilmil.palembang.go.id